



## LAPORAN AKTUALISASI

### PENYEDIAAN DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA WEBSITE

[puskajianqaran.dpr.go.id](http://puskajianqaran.dpr.go.id)

Disusun Oleh:

Nama : Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

NIP : 19941202 201903 2 001

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PENYEDIAAN DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA WEBSITE  
[puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id)

Disusun Oleh:

Nama : Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

NIP : 19941202 201903 2 001

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peserta Diklat,

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.  
199412022019032001

Menyetujui

Mentor,

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP. 198806212014022001

Coach,

Agus Supriyono, S.S., M.A.P  
NIP. 196902082003121003

## KATA PENGANTAR

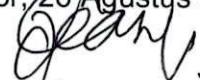
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun rancangan aktualisasi tepat pada waktunya. Rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S. H., M. M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
3. Agus Supriyono, S.S., M.A.P., selaku *coach*.
4. Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM., selaku mentor.

Rancangan aktualisasi ini menyajikan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, penulis merencanakan kegiatan aktualisasi yang dilandasi nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, serta unsur peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik. Penulis berharap rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, menjadi referensi serta literatur berbagai pihak terkait, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 26 Agustus 2019



Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

## DAFTAR ISI

LAPORAN AKTUALISASI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
PROFIL ORGANISASI .....	4
A. VISI MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN.....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	6
C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI.....	7
RANCANGAN AKTUALISASI .....	9
A. Identifikasi Isu.....	9
B. Pemilihan Isu Prioritas (Analisis USG).....	12
C. Gagasan Pemecahan Isu .....	14
D. Rancangan Aktualisasi .....	16
PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	27
1. Kegiatan 1 .....	27
2. Kegiatan 2 .....	33
3. Kegiatan 3 .....	41
4. Kegiatan 4 .....	45
5. STAKEHOLDER .....	50
6. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA .....	50
7. ANALISIS DAMPAK .....	51
8. JADWAL KEGIATAN.....	58
PENUTUP .....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
LAMPIRAN .....	62

<b>LAMPIRAN KEGIATAN 1 .....</b>	<b>63</b>
Lampiran Tahapan Kegiatan 1.1.....	64
Lampiran Tahapan Kegiatan 1.2.....	67
<b>LAMPIRAN KEGIATAN 2 .....</b>	<b>68</b>
Lampiran Tahapan Kegiatan 2.1.....	69
Lampiran Tahapan Kegiatan 2.2.....	71
Lampiran Tahapan Kegiatan 2.3.....	107
Tahapan Kegiatan 2.4.....	110
<b>LAMPIRAN KEGIATAN 3 .....</b>	<b>111</b>
Lampiran Tahapan Kegiatan 3.1.....	112
Lampiran Tahapan Kegiatan 3.2.....	113
<b>LAMPIRAN KEGIATAN 4 .....</b>	<b>116</b>
Lampiran Tahapan Kegiatan 4.1.....	117
Lampiran Tahapan Kegiatan 4.2.....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran .....	6
Gambar 2. Produk Data Indikator dalam Website Pusat Kajian Anggaran ..	11
Gambar 3. Tahapan Kegiatan Aktualisasi.....	15
Gambar 4. Kegiatan 1 Aktualisasi.....	27
Gambar 5. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.....	28
Gambar 6. Konsultasi dengan Mentor.....	29
Gambar 7. Kegiatan 2 Aktualisasi.....	33
Gambar 8. Konsultasi dengan Mentor.....	37
Gambar 9. Kegiatan 3 Aktualisasi.....	41
Gambar 10. Kegiatan Presentasi dalam Rapat Internal .....	43
Gambar 11. Kegiatan Presentasi dalam Rapat Internal .....	43
Gambar 12. Kegiatan 4 Aktualisasi.....	46
Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor.....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG.....	12
Tabel 2. Matriks Kegiatan Aktualisasi .....	16
Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 1 .....	27
Tabel 4. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 2 .....	34
Tabel 5. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 3 .....	41
Tabel 6. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 4 .....	46
Tabel 7. Stakeholder Aktualisasi.....	50
Tabel 8. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem pembelajaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menuntut seluruh peserta untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari dalam suatu agenda Habituasi. Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Agenda Habituasi ini memfasilitasi peserta untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan mata pelatihan yang telah dipelajari. Agenda Habituasi ini meliputi rancangan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, dan menyusun laporan aktualisasi.

Pembelajaran agenda habituasi diawali dengan sesi penjelasan konsep habituasi, penyusunan, serta menghubungkan materi-materi lainnya yaitu Agenda Nilai-Nilai Dasar ASN pada Agenda Habituasi. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi bertujuan agar Peserta memahami tuntutan pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran aktualisasi. Setiap rancangan aktualisasi yang direncanakan peserta harus mengandung unsur-unsur Nilai-Nilai Dasar ASN dan Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI. Peserta harus mampu menghubungkan kedua agenda ini dengan tujuan agar peserta mampu mengaktualisasikan perubahan-perubahan di unit kerjanya yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Selain itu, peserta juga didorong untuk mampu melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam pelaksanaan

tugas jabatan, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.

Kompetensi menyusun rancangan aktualisasi dapat diperoleh peserta dengan proses pembimbingan dari *coach* (pembimbing yang ditunjuk dari lembaga pelatihan) dan *mentor* (atasan peserta yang ditujuk oleh pejabat pembina kepegawaian instansi peserta). Sehingga peserta mampu menyusun kertas kerja rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, menerapkan rancangan aktualisasi, dan menyusun laporan aktualisasi, tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, mempersiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi, melaksanakan seminar aktualisasi, dan point terpentingnya peserta mampu menganalisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS. Dengan pemahaman ini, di penghujung pembelajaran, peserta mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional. Disamping *coach* yang ditunjuk di tempat pelatihan, selama masa *off campus* untuk aktualisasi di tempat kerja, dimungkinkan peserta akan belajar tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas melalui proses pembimbingan dari *coach* yang ditunjuk oleh pejabat Pembina kepegawaian instansi. *Coach* tersebut bertugas membimbing peserta melakukan kegiatan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dalam kondisi tertentu *coach* yang dimaksud disini perannya dimungkinkan dapat dirangkap oleh *mentor* peserta.

Dengan adanya pengalaman belajar pada agenda habituasi ini dirancang agar peserta mendapatkan pengetahuan tentang konsep habituasi melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi di lingkungan kerjanya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disoroti oleh peserta yang terjadi di unit kerja terkait. Adanya kendala ini yang mendasari kegiatan perubahan atau invasi yang

dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja sehingga dalam jangka Panjang akan meningkatkan kinerja di unit kerja peserta.

## **B. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN

## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI**

#### **A. VISI MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN
- 4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.

Pusat Kajian Anggaran yang bekerja di bawah Badan Keahlian DPR RI fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagai unsur pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, memiliki visi sebagai berikut:

- ❖ **Pusat Kajian Anggaran yang profesional** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
- ❖ **Pusat Kajian Anggaran yang andal** mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- ❖ **Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran memiliki misi sebagai berikut:

- ❖ Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- ❖ Memperkuat manajemen pengetahuan.
- ❖ Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran



### **C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran
- 2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran
- 3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran
- 4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- 6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- 7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
- 8) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran
- 9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran
- 10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran
- 11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- d. Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya;
- e. Menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan infoemasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri;
- g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- h. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- j. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;
- k. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan; dan
- l. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu.

## **BAB III**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. Identifikasi Isu**

##### **1. Belum Tersedianya Data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga**

Visi Pusat Kajian Anggaran adalah membentuk unit organisasi yang akuntabel, yaitu salah satunya dengan pemberian informasi kepada publik yang terkait dengan fungsi anggaran DPR RI. Sebagai supporting system DPR RI, Pusat Kajian Anggaran memberikan dukungan pada Badan Keahlian DPR RI, melalui pemberian informasi yang terkait APBN dan produk-produk dalam bentuk Analisis, Referensi, Buku, Buletin APBN, dan Data Indikator. Seluruh informasi dan produk ini dapat diakses melalui website resmi Pusat Kajian Anggaran yaitu <https://puskajianggaran.dpr.go.id/>.

Untuk mewujudkan Visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel yaitu pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, Pusat Kajian Anggaran memiliki website [puskajianggaran.dpr.go.id](https://puskajianggaran.dpr.go.id) yang berisikan tentang output yang dihasilkan oleh Analis APBN dan informasi terkait dengan APBN. Namun saat ini website tersebut belum menyajikan data-data yang terkait anggaran kementerian/lembaga yang sebenarnya merupakan salah satu fungsi anggaran yang dapat diberikan oleh Pusat Kajian Anggaran sebagai referensi untuk Anggota DPR RI maupun Analis APBN. Tersedianya data-data yang dapat mendukung kinerja Analis APBN dalam penyusunan Analisis APBN, khususnya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga yang dapat diakses melalui website Pusat

Kajian Anggaran sehingga mempermudah staf PKA dalam pengumpulan data APBN untuk keperluan analisis.

**2. Kurang menariknya penyajian hasil Analisis APBN dalam bentuk media cetak di website Pusat Kajian Anggaran**

Salah satu tugas Analis APBN adalah menyusun Analisis APBN yang informatif untuk mendukung fungsi anggaran Anggota DPR RI yang terkait dengan APBN. Namun sejak tahun 2016, penyajian produk Analisis yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran saat ini pun belum dimanfaatkan dengan baik karena penyediaan output masih dalam bentuk soft file dan sangat terbatas untuk beberapa produk saja. Untuk meningkatkan minat pembaca, khususnya Anggota DPR RI, diperlukan penyajian analisis dalam bentuk yang lebih menarik, misalnya dengan menggunakan videografis. Dengan penyajian output dan informasi dalam bentuk yang lebih menarik, diharapkan penyampaian informasi lebih mudah diterima Anggota DPR sebagai pembaca sehingga bentuk dukungan Pusat Kajian Anggaran dalam menyediakan informasi akan isu APBN terkini lebih mudah dilakukan.

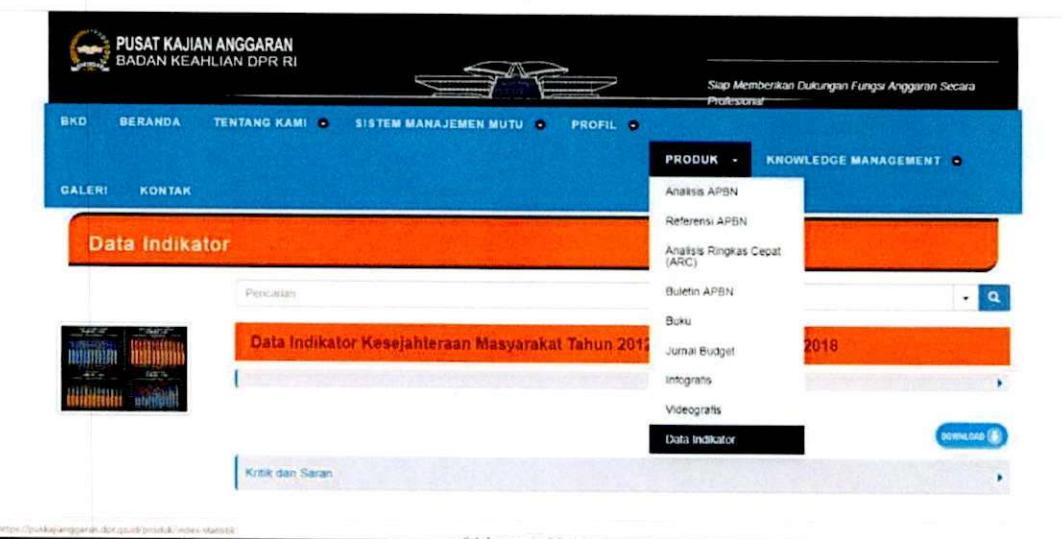
**3. Belum tersedianya informasi dan definisi terkait Postur APBN terkini**

Untuk mendukung fungsi anggaran DPR RI, Pusat Kajian Anggaran menyediakan informasi dan produk yang terkait dengan APBN dengan tujuan dapat menjadi referensi Anggota DPR dalam membuat kebijakan. Melalui produk ini, diharapkan pengambilan kebijakan yang terkait dengan anggaran Pemerintah dan APBN dilakukan secara profesional, adil, dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Sebagai unit organisasi yang melingkupi APBN dan terdiri dari Analis APBN, penyediaan informasi terkait APBN merupakan

informasi dasar yang seharusnya tersedia dan dapat diakses melalui website resmi Pusat Kajian Anggaran. Informasi yang seharusnya disediakan ini antara lain data perkembangan APBN terbaru serta informasi postur APBN terbaru beserta definisinya. Dengan tersedianya akses informasi dan data perkembangan APBN yang terintegrasi tersebut, akan memudahkan baik Anggota DPR maupun Analis APBN dalam penyusunan analisis.

**Gambar 2. Produk Data Indikator dalam Website Pusat Kajian Anggaran**



## B. Pemilihan Isu Prioritas (Analisis USG)

**Tabel 1. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG**

No.	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1.	<b>Belum Tersedianya Data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga</b>	4	4	4	12*
2.	Kurang menariknya penyajian hasil Analisis APBN dalam bentuk media cetak di website Pusat Kajian Anggaran	3	4	3	10
3.	Belum tersedianya informasi dan definisi terkait Postur APBN terkini	3	4	4	11

- U = Urgency (Penting)

DPR RI akan memasuki periode baru yaitu periode tahun 2019-2024. Salah satu kegiatan DPR RI adalah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah yaitu kementerian/lembaga terkait rencana program kerja dan evaluasi kebijakan. Untuk itu, Anggota DPR RI membutuhkan referensi data yang terkait program kementerian/lembaga, salah satunya data anggaran kementerian/lembaga. Untuk itu sebagai supporting system Anggota DPR RI, Pusat Kajian Anggaran harus bisa menyediakan informasi terkait dengan program kementerian/lembaga.

Salah satu tugas dan fungsi analis APBN adalah mengumpulkan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya. Namun selama ini data terkait kementerian/lembaga belum tersedia di website Pusat Kajian Anggaran. Sementara itu, dalam penggerjaan Analisis yang sesuai Siklus APBN membutuhkan data

terkait anggaran program dari Kementerian/Lembaga. Namun dengan terbatasnya penyediaan data di Pusat Kajian Anggaran, saat ini pengumpulan perlu dilakukan pengumpulan data kembali yang menyebabkan penyusunan Analisis kurang efisien. Sehingga terdapat unsur *urgency* untuk dilakukan penyediaan data RKA K/L pada website guna mendukung tugas Pusat Kajian Anggaran, maupun dimanfaatkan oleh Anggota DPR ataupun masyarakat umum.

- S = Seriousness (Keseriusan)

Perubahan alokasi pagu pada tiap program kementerian/lembaga menyebabkan data-data RKA K/L berkembang setiap tahunnya. Perkembangan data ini mengharuskan penyajian data harus terinventarisasi dan termutakhirkan untuk memudahkan penyusunan analisis. Informasi tentang anggaran program juga dapat digunakan oleh anggota DPR RI sebagai salah satu sumber informasi dalam rapat-rapat pembahasan bersama pemerintah terkait anggaran, sehingga dibutuhkan keseriusan (*seriousness*) dalam penyajian data-data RKA K/L pada website Pusat Kajian Anggaran.

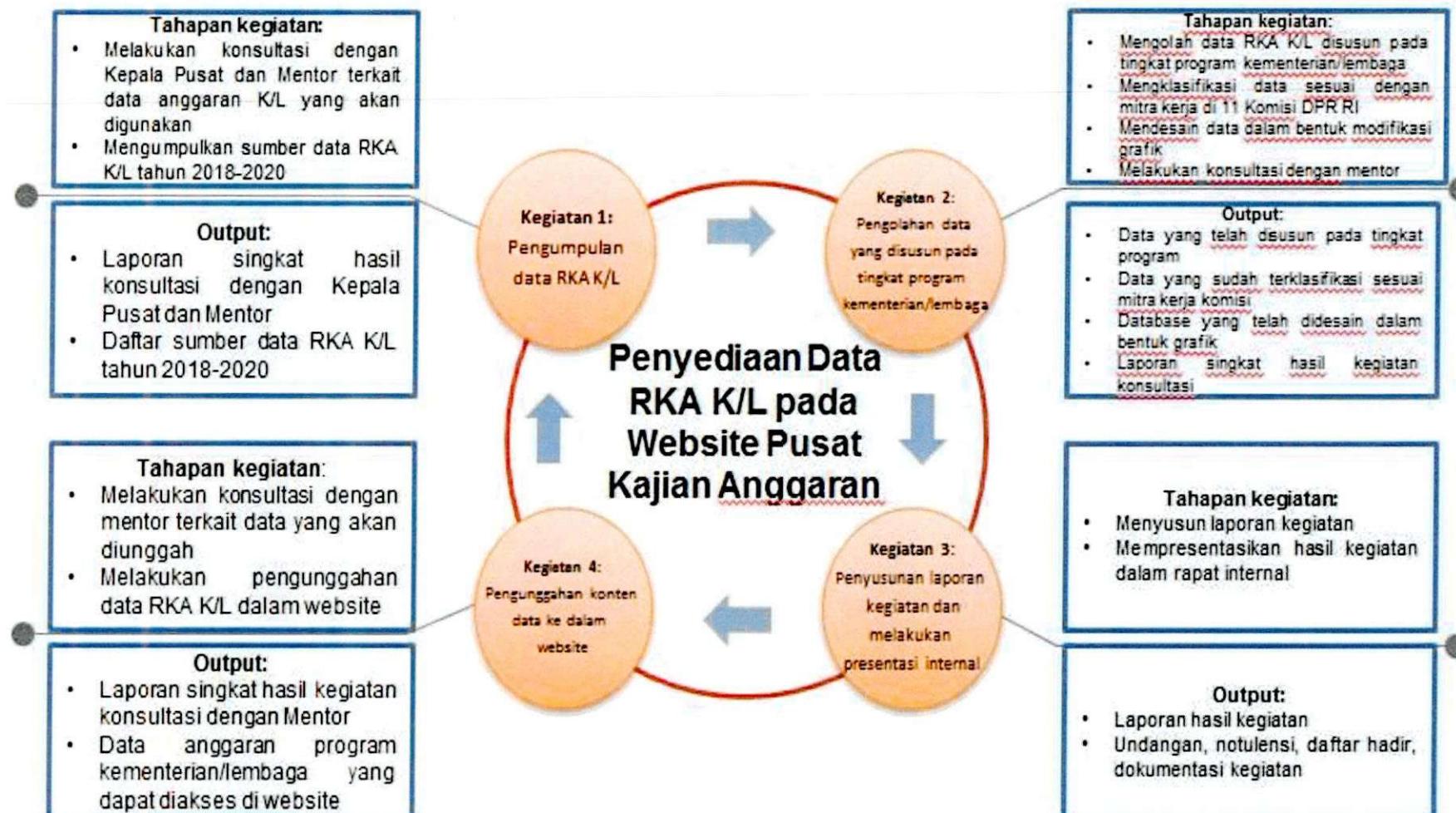
- G = Growth (Berkembangnya Isu)

Dalam website Pusat Kajian Anggaran terutama pada menu Produk Data Indikator masih belum tersedia data yang terkait program kementerian/lembaga, terutama yang berhubungan dengan anggaran, sehingga perlu adanya (*growth*) pengembangan data pada menu Produk Data Indikator sehingga konten data lebih beragam, mutakhir, dan bermanfaat. Data Rencana Kerja Anggaran sangat penting dalam penyusunan analisis. Adanya perubahan sasaran program berpengaruh pada rencana kerja anggaran kementerian/lembaga sehingga anggaran per program berbeda setiap tahunnya. Perkembangan data anggaran kementerian/lembaga per program ini sangat penting karena dapat menjadi evaluasi kinerja program dan rencana kebijakan tahun anggaran berikutnya.

### **C. Gagasan Pemecahan Isu**

<b>Unit Kerja</b>	<b>:</b>	<b>Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI</b>
<b>Identifikasi Isu</b>	<b>:</b>	<b>1. Belum tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga</b> <b>2. Kurang menariknya penyajian hasil Analisis APBN dalam bentuk media cetak di website Pusat Kajian Anggaran</b> <b>3. Belum tersedianya informasi dan definisi terkait Postur APBN terkini</b>
<b>Isu yang Diangkat</b>	<b>:</b>	<b>Belum tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga</b>
<b>Gagasan</b>	<b>:</b>	<b>Tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga</b>

Gambar 3. Tahapan Kegiatan Aktualisasi



## D. Rancangan Aktualisasi

**Tabel 2. Matriks Kegiatan Aktualisasi**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Pengumpulan data RKA K/L	<p>1.1 Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor terkait data-data anggaran kementerian/lembaga yang akan disajikan dalam website</p> <p>1.2 Mengumpulkan sumber data RKA K/L tahun 2018 - 2020</p>	<p>1.1 Laporan singkat hasil konsultasi dengan Kepala Pusat dan Mentor terkait identifikasi isu dan gagasan isu yang digunakan</p> <p>1.2 Daftar sumber data RKA K/L tahun 2018 - 2020</p>	<p>Nilai Dasar dan Peran Kedudukan ASN yang terkandung:</p> <p>- <b>Akuntabilitas</b>, dimana sumber data diperoleh dari instansi pemerintah yang dapat diakui kebenerannya.</p> <p>Kegiatan ini juga merupakan bukti tanggung jawab Analis APBN dalam menyediakan data dan informasi yang aktual</p> <p>- <b>Nasionalisme</b>, dimana kegiatan konsultasi dengan pimpinan dan mentor dilakukan sebagai bentuk menghormati keputusan, tenggang</p>	<p>- Kegiatan ini mendukung visi <b>Akuntabel</b>, melalui penyajian data dan informasi kepada publik yang terkini sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam mendukung fungsi anggaran</p> <p>- Kegiatan konsultasi bersama Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor membutuhkan kerjasama dan persetujuan dari pimpinan sehingga dapat mendorong</p>	<p>- Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yang <b>Akuntabel</b>, karena dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan dan mentor guna membahas proses kegiatan yang akan dilakukan penulis.</p> <p>Selain itu, data yang diperoleh diambil dari kementerian/lembaga terkait sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>- Kegiatan ini mendukung</p>

	<p>rasa, dan disiplin. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kerjasama dalam unit organisasi karena keputusan ditentukan secara musyawarah dan dilakukan untuk kepentingan bersama</p> <p>-<b>Komitmen Mutu</b>, yaitu penyajian data anggaran dalam bentuk grafik yang inovatif dan belum diterapkan di instansi lain. Dengan kegiatan ini, maka proses perumusan kebijakan oleh DPR RI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien</p> <p>-<b>WoG</b>, yaitu adanya kegiatan pengumpulan sumber data yang diperoleh dari instansi pemerintah lain sebagai bentuk kolaborasi</p>	<p>visi organisasi yaitu Pusat Kajian Anggaran yang <b>Profesional</b>.</p> <p>ASN selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensi dengan menyediakan informasi yang dapat diakses secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yaitu menyediaan informasi kepada publik dan mendukung kinerja</p> <p>- Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu <b>Integritas</b>, karena seluruh tahapan kegiatan ini</p>	<p>penguatan nilai organisasi yang</p> <p><b>Profesional</b>, karena dilakukan inovasi dalam cara kerja sehingga ASN selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensi dengan menyediakan informasi yang dapat diakses secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yaitu menyediaan informasi kepada publik dan mendukung kinerja</p> <p>- Kegiatan ini mendukung nilai organisasi yaitu <b>Integritas</b>, karena seluruh tahapan kegiatan ini</p>

		<p>pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan yang lebih luas dan efektif dalam mencapai prioritas nasional</p>	
		<p>-<b>Pelayanan Publik</b>, dimana kegiatan ini mendukung prinsip pelayanan publik yang akuntabel karena data diperoleh dari instansi resmi pemerintah dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu, kegiatan ini mendukung prinsip transparansi karena masyarakat yang juga sebagai penerima layanan dapat mengakses informasi dan turut serta mengawasi pelaksanaan anggaran</p>	<p>dilakukan dengan jujur dan mampu mendukung tugas dan fungsi ASN. Melalui tahapan kegiatan ini, penulis menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan untuk kegiatan ini diperoleh dari instansi resmi pemerintah sehingga setiap data memiliki landasan hukum yang kuat.</p>

				program pemerintah dengan mudah dan cepat	
2.	Pengolahan data yang disusun pada tingkat program kementerian/lembaga	2.1 Mengolah data RKA K/L yang disusun pada tingkat program K/L	2.1 Data anggaran yang telah disusun pada tingkat program K/L Database anggaran K/L pada tingkat program dalam bentuk modifikasi grafik	Nilai dan Peran Kedudukan ASN yang terkandung: - <b>Akuntabilitas</b> , yaitu adanya pengolahan data dilakukan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab sehingga data tersebut memiliki kualitas mutu - <b>Etika publik</b> , yaitu seluruh tahapan kegiatan dilakukan dengan cermat, disiplin, jujur, dan sesuai dengan mitra kerja	- Kegiatan ini mendukung visi Pusat Kajian Anggaran yang <b>Profesional</b> , dimana dalam proses kegiatannya membutuhkan kecermatan dan disiplin sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dan membentuk organisasi yang lebih profesional - Tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor mendukung visi organisasi yaitu <b>Andal</b> , karena memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang
		2.2 Mengklasifikasikan data sesuai dengan mitra kerja 11 komisi DPR RI	2.2 Database yang telah diklasifikasi berdasarkan mitra kerja komisi	2.2 Database yang telah diklasifikasi berdasarkan mitra kerja komisi	
		2.3 Mendesain database RKA K/L pada tingkat program dalam bentuk modifikasi	2.3 Database anggaran K/L pada tingkat program dalam bentuk grafik	2.3 Database anggaran K/L pada tingkat program dalam bentuk grafik	

		grafik	2.4 Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kelaikan dan desain database	2.4 Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor terkait database	<p>tahapan kegiatan ini dilakukan agar penulis mampu menyediakan informasi yang akurat pada publik.</p> <p><b>Komitmen Mutu</b>, dimana kegiatan pengolahan data dan didesain guna memudahkan pembaca namun tetap dilakukan dengan berorientasi pada mutu.</p> <p><b>Manajemen ASN</b>, yaitu kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi ASN berupa wawasan pemerintah serta kompetensi pengolahan data dengan modifikasi grafik menggunakan Microsoft Excel. Seluruh tahapan kegiatan ini sejalan dengan fungsi utama manajemen ASN</p>	<p>dapat mendukung pelaksanaan dan fungsi tugas</p>
--	--	--------	---	---	--	---

				ya itu menciptakan ASN yang kompeten dibidangnya.
				<p><b>Pelayanan publik</b>, dimana kemudahan akses data nantinya dapat mendorong efektivitas dan efisiensi Anggota DPR RI dalam perumusan kebijakan anggaran pemerintah. Selain itu, kegiatan ini mendukung prinsip mudah dipahami dan cepat akses informasi oleh masyarakat sebagai penerima layanan.</p>
3.	Penyusunan Laporan Kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal	3.1 Menyusun laporan kegiatan	3.1 Laporan hasil kegiatan aktualisasi	<p>Nilai dan Peran Kedudukan ASN yang terkandung: <b>Akuntabilitas</b>, dimana penyusunan laporan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparan, dan sesuai</p> <p>- Kegiatan mendukung organisasi <b>Profesional</b>, yaitu</p>
	3.2 Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal	3.2 Undangan, daftar hadir, notulensi, dokumentasi		<p>Ini visi</p> <p>tugas untuk memberikan</p>

				<p>kegiatan dengan kejelasan target. Selain itu, tahapan pelaksanaan presentasi hasil kegiatan dalam rapat internal bertujuan untuk memastikan proses kegiatan yang telah dilakukan cukup baik. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Penulis dalam memberikan kegiatan terbaik dalam mendukung fungsi anggaran</p> <p><b>-Etika publik</b>, yaitu penyusunan laporan kegiatan dilakukan dengan cermat, disiplin, dan sesuai dengan kaidah penulisan laporan.</p> <p>Tahapan kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis dalam</p>	<p>dukungan keahlian - Kegiatan sosialisasi mendukung visi organisasi yaitu <b>Andal</b>, yaitu mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana awal data RKA K/L dalam unit kerja guna mendukung pelaksanaan tugas yang terkait fungsi anggaran</p>	<p>- Kegiatan sosialisasi mendukung visi organisasi yaitu <b>Andal</b>, yaitu mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana awal data RKA K/L dalam unit kerja guna mendukung pelaksanaan tugas yang terkait fungsi anggaran</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

4.	<p>Pengunggahan konten data RKA K/L yang telah didesain dan diklasifikasikan pada website</p> <p>4.1 Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait data-data yang akan diunggah ke dalam website</p> <p>4.2 Melakukan pengunggahan data-</p>	<p>- Laporan singkat hasil kegiatan konsultasi dengan Mentor</p> <p>- <b>Akuntabilitas</b>, dimana penyajian data dilakukan dengan penuh</p>	<p>Nilai dan Peran Kedudukan ASN yang terkandung:</p> <p>- <b>Akuntabilitas</b>, dimana penyajian data dilakukan untuk</p>	<p>- Kemudahan akses data RKA K/L pada website mendukung nilai <b>Akuntabel</b>, karena penyajian data dilakukan untuk publik tanpa</p>

		<p>data RKA K/L di website Pusat Kajian Anggaran</p> <p>- <b>Nasionalisme,</b> Kegiatan penyediaan data ini menjadi upaya pemerintah untuk memelihara ketertiban dan disiplin menjalankan amanah rakyat. Walaupun setiap kementerian/lembaga memiliki fungsi dan program yang berbeda, tersedianya data yang terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme oleh instansi pemerintah guna mewujudkan negara yang sesuai dengan cita-cita</p>	<p>bagaimana yang dapat diakses di website</p> <p>- <b>Nasionalisme,</b> Kegiatan penyediaan data ini menjadi upaya pemerintah untuk memelihara ketertiban dan disiplin menjalankan amanah rakyat. Walaupun setiap kementerian/lembaga memiliki fungsi dan program yang berbeda, tersedianya data yang terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme oleh instansi pemerintah guna mewujudkan negara yang sesuai dengan cita-cita</p>

	<p style="text-align: right;">nasional</p> <p>- <b>Anti korupsi</b>, dimana terpublikasinya data RKA K/L menjadi penwujudan instansi Pemerintah yang tetap bersatu walaupun program dan sektor yang berbeda. Hal ini menunjukkan sebagai instansi Pemerintah, rencana program terpublikasikan secara transparan sehingga meminimalisir risiko penyelewengan anggaran</p> <p>- <b>WoG</b>, dimana tersedianya data RKA K/L yang terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak, baik</p>			

	DPR RI maupun instansi pemerintah lainnya sehingga dapat mendukung kerjasama antar instansi pemerintah	
	<p><b>Pelayanan publik</b>, dimana tersedianya data RKA K/L melalui website menganut prinsip aksesibel yang dapat bermanfaat bagi Analis APBN maupun masyarakat</p>	

## BAB IV

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

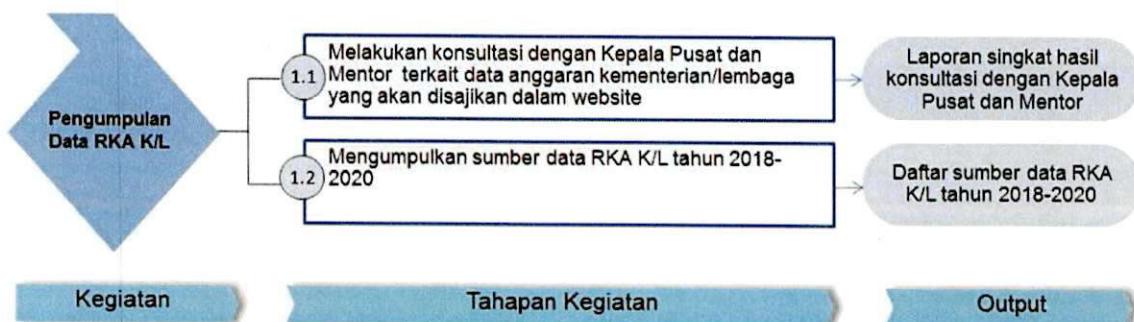
#### A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Kegiatan aktualisasi terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

##### 1. Kegiatan 1

Kegiatan 1 yaitu pengumpulan data RKA K/L. Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi ini adalah pengumpulan data RKA K/L yang dilalui melalui 2 (dua) tahapan kegiatan.

**Gambar 4. Kegiatan 1 Aktualisasi**



**Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 1**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1.	Akuntabilitas	Pelayanan publik	Akuntabel
2.	Nasionalisme	Whole of Government (WoG)	Profesional
3.	Komitmen mutu	-	Integritas

Tujuan dari pengumpulan data-data RKA K/L ini adalah untuk memastikan bahwa data-data yang akan disajikan di website Pusat Kajian Anggaran diperoleh dari sumber yang sama. Data yang akan disajikan ke dalam website yaitu RKA K/L tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

a) Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu:

1.1 Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor

Tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. Pokok pembahasan dalam konsultasi ini adalah rencana tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu 30 hari kedepan. Konsultasi ini membahas jumlah periode tahun anggaran yang akan disajikan di website Pusat Kajian Anggaran.

**Gambar 5. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran**



Selain melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, Penulis juga melakukan konsultasi dengan Mentor. Kegiatan konsultasi ini membahas sumber data yang akan digunakan dan disajikan ke dalam website Pusat Kajian Anggaran. Selain itu, konsultasi ini membahas kendala-kendala yang mungkin dihadapi Penulis dalam pelaksanaan kegiatan.

**Gambar 6. Konsultasi dengan Mentor**



- 1.2 Mengumpulkan sumber data RKA K/L tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Tahapan kegiatan pengumpulan data RKA K/L yang dilakukan oleh Penulis diperoleh dari data-data resmi Pemerintah. Untuk data RKA K/L tahun 2018, data diperoleh dari Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Sementara itu untuk data RKA K/L tahun 2019, diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Data anggaran per program ini meliputi 27 kementerian dan 47 lembaga. Lembaga ini hanya meliputi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

- 1) Akuntabilitas

Tahapan pengumpulan sumber data RKA K/L yang akan digunakan diperoleh dari Peraturan Presiden dan himpunan RKA K/L yang disahkan oleh instansi resmi pemerintah. Sumber data yang akan digunakan penulis ini dapat diakui keabsahannya sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemberian informasi pelaksanaan program pemerintahan kepada publik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Dengan penyediaan data RKA K/L yang aktual dan transparan ini, penulis sebagai Analis APBN menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada publik.

2) Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah air yang didasari pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tahapan kegiatan ini dilakukan konsultasi dan diskusi bersama pimpinan dan mentor. Diskusi ini bertujuan untuk menerima arahan dari pimpinan sebagai bentuk menghormati keputusan, tenggang rasa, dan disiplin. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kerjasama dalam unit organisasi karena keputusan ditentukan secara musyawarah dan dilakukan untuk kepentingan bersama.

3) Komitmen Mutu

Komitmen mutu diartikan sebagai pembaruan (inovasi) sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat menjadi inovasi pemerintah untuk menyajikan informasi kepada publik yang mendukung efektivitas dan efisiensi. Salah satu informasi tersebut yaitu perkembangan anggaran program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Informasi ini sangat penting bagi publik, maupun bagi DPR RI dalam penentuan kebijakan tahun anggaran selanjutnya. Namun saat ini penyajian data masih dalam berbentuk tabel sehingga masyarakat sulit untuk memahami perkembangan anggaran pemerintah. Selain itu, penyediaan informasi terkait anggaran program kementerian/lembaga belum terintegrasi berdasarkan pembagian mitra Komisi DPR RI sehingga pelaksanaan pengawasan fungsi anggaran menjadi kurang efisien. Dengan adanya kegiatan ini, maka dapat menjadi suatu pembaruan dari Pusat Kajian Anggaran untuk mendukung DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran.

#### 4) Whole of Government (WoG)

WoG merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif melalui koordinasi guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kegiatan aktualisasi ini yaitu menyediakan informasi data perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang dapat diakses dengan bebas oleh publik. Tujuan kegiatan ini ialah agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI dalam perumusan kebijakan terkait anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pada tahapan kegiatan pengumpulan sumber data yang akan digunakan, penulis hanya menggunakan sumber data dari instansi resmi pemerintah. Tahapan kegiatan ini merupakan wujud konsep WoG karena data diperoleh dari instansi pemerintah selain DPR RI. Tujuan kegiatan ini juga melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait (kementerian/lembaga) karena terkait dengan pembangunan kebijakan di masa mendatang untuk bersinergi memenuhi prioritas nasional.

#### 5) Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat ataupun organisasi sesuai keperluannya. Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berupaya memberikan dukungan pelayanan sesuai fungsi yaitu fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Untuk fungsi anggaran, salah satunya didukung oleh Pusat Kajian Anggaran melalui penyediaan informasi baik yang terbuka maupun tertutup. Namun data perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang seharusnya dapat diakses oleh publik belum terlaksana. Melalui tahapan kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor, disepakati keputusan untuk menyediakan data anggaran program kementerian/lembaga yang dapat diakses secara bebas melalui website [puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id). Untuk sumber data yang digunakan diperoleh dari instansi pemerintah dengan peraturan hukum yang kuat. Tahapan kegiatan ini mendukung unsur pelayanan publik yang akuntabel yaitu rencana, pelaksanaan proses, dan hasil kegiatan

dapat dipercaya kebenarannya. Adanya kemudahan dalam akses data ini mendukung prinsip pelayanan publik yaitu transparansi data pemerintahan sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Kegiatan penyediaan data RKA K/L ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya kepada organisasi, tetapi juga masyarakat umum sebagai penerima layanan pemerintah.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Tahapan kegiatan ini mendukung nilai akuntabel dalam organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Tahapan kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor merupakan bentuk koordinasi secara formal yang membahas proses kegiatan yang akan dilakukan penulis. Selain itu, tahapan kegiatan pengumpulan sumber data yang diperoleh dari instansi pemerintah lain merupakan bentuk kerjasama antar instansi pemerintah untuk memberikan informasi terkait anggaran program kepada publik.

2) Profesional

Salah satu tugas Analis APBN ialah menyediakan informasi terkait anggaran kepada publik. Namun saat ini informasi yang dapat diakses dengan bebas masih terbatas. Padahal, penyediaan informasi ini merupakan tugas penting yang harus dijalankan untuk mendukung fungsi anggaran oleh DPR RI. Karenanya, kegiatan aktualisasi ini ialah memperluas informasi terkait anggaran yang dapat diakses secara bebas melalui website Pusat Kajian Anggaran, guna menciptakan organisasi yang profesional. Kegiatan ini ditempuh melalui 4 (empat) tahapan kegiatan, salah satunya pengumpulan sumber data RKA K/L. Melalui tahapan kegiatan ini, Analis APBN dapat meningkatkan kompetensi dengan menyediakan informasi kepada Anggota DPR RI. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN yaitu menyediakan informasi sehingga dapat menjadi *supporting system* Anggota DPR RI yang profesional.

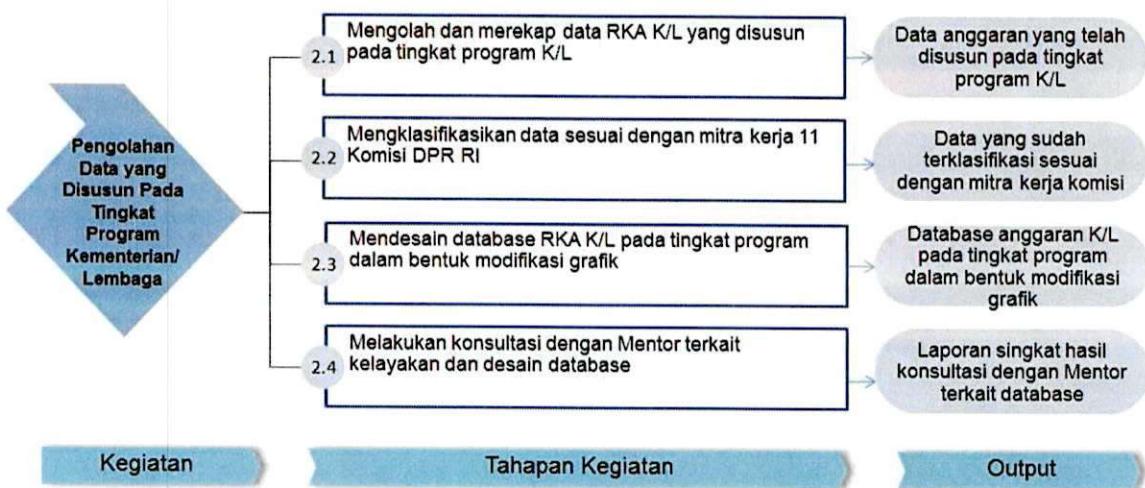
### 3) Integritas

Integritas merupakan sifat jujur, konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Melalui tahapan kegiatan ini, penulis menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan untuk kegiatan ini diperoleh dari instansi resmi pemerintah sehingga setiap data memiliki landasan hukum yang kuat. Pada tahapan kegiatan konsultasi dengan pimpinan dan mentor, penulis menerapkan nilai integritas karena mendorong profesionalitas yaitu siap berkoordinasi dengan pihak lain guna mencapai tujuan kegiatan terbaik. Selain itu, pada tahapan kegiatan pengumpulan sumber data RKA K/L, dilakukan dengan jujur dan transparan sehingga diharapkan data ini dapat bermanfaat bagi Anggota DPR RI, Analis APBN, serta masyarakat umum.

## 2. Kegiatan 2

Kegiatan 2 yaitu pengolahan data per program kementerian/lembaga. Kegiatan 2 yaitu rangkaian pengolahan data ini ditempuh melalui 4 (empat) tahapan kegiatan.

**Gambar 7. Kegiatan 2 Aktualisasi**



**Tabel 4. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 2**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1.	Akuntabilitas	Manajemen ASN	Akuntabel
2.	Etika publik	Pelayanan publik	Profesional
3.	Komitmen mutu	-	Integritas

Tujuan dari pengolahan data yang pada tingkat program kementerian/lembaga yang diklasifikasikan sesuai dengan mitra kerja Komisi DPR RI ini untuk memudahkan baik Analis APBN dan Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dukungan anggaran. Pengolahan data ini

a) Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu:

2.1 Mengolah dan merekap data RKA K/L yang disusun pada tingkat program kementerian/lembaga

Tahapan kegiatan ini meliputi proses input data yang telah diperoleh dalam Kegiatan 1. Proses input data ini disusun berdasarkan tingkat program serta total anggaran yang dialokasikan pada kementerian/lembaga. Output dari tahapan kegiatan ini ialah contoh data RKA K/L yang telah disusun pada tingkat program tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020.

2.2 Mengklasifikasikan data sesuai dengan pembagian komisinya.

Tahapan kegiatan ini dapat dilakukan setelah data disusun pada tingkat program kementerian/lembaga. Data yang telah disusun pada tingkat program tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pembagian mitra kerja di 11 Komisi DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Tujuan utama pembagian mitra kerja komisi ini ialah agar Anggota DPR RI yang bertugas di komisi, dapat mengakses informasi perkembangan anggaran program kementerian/lembaga, sehingga pelaksanaan dan pengawasan fungsi anggaran dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Adapun pembagian mitra kerja komisi DPR RI yang digunakan pada data ini adalah sebagai berikut:

- **Komisi I:** Kementerian Pertahanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Intelijen Negara; Badan Siber dan Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Komisi II: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kantor Staf Presiden; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Badan Kepegawaian Negara; Lembaga Administrasi Negara; Ombudsman RI; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan Arsip Nasional Republik Indonesia
- Komisi III: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Komisi Pemberantasan Korupsi; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Komisi Yudisial; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Badan Narkotika Nasional; Badan Penanggulangan Terorisme; Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan Dewan Perwakilan Daerah
- Komisi IV: Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Komisi V : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa; Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

- Komisi VI: Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Badan Standardisasi Nasional; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas; dan Pelabuhan Bebas Sabang
  - Komisi VII: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi; Badan Tenaga Nuklir; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Informasi Geospasial; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  - Komisi VIII: Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - Komisi IX: Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
  - Komisi X: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pariwisata; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan Badan Ekonomi Kreatif
  - Komisi XI: Kementerian Keuangan; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Badan Pusat Statistik; Badan Pemeriksa Keuangan; dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2.3 Mendesain database RKA K/L pada tingkat program dalam bentuk modifikasi grafik

Pada tahapan kegiatan ini, data RKA K/L yang telah disusun pada tingkat program sesuai dengan pembagian mitra kerja komisi kemudian diolah menggunakan software Microsoft Excel. Dari tahapan kegiatan ini, jumlah anggaran per program kementerian/lembaga diolah dalam bentuk grafik. Tujuan dari tahapan kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan anggaran program kementerian/lembaga dengan desain data yang mudah dipahami. Output dari tahapan kegiatan ini ialah contoh data anggaran tingkat program dalam bentuk grafik yang akan dilampirkan di akhir laporan.

#### 2.4 Melakukan konsultasi dengan Mentor

Setelah mengklasifikasikan dan mengolah data, maka tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan Mentor. Konsultasi ini membahas tahapan kegiatan Penulis, kelaikan database yang telah diolah dan didesain guna menerima tanggapan atau persetujuan pengunggahan database di website. Dengan adanya tahapan kegiatan ini, Penulis dapat memperbaiki database sebelum diunggah kedalam website. Selain itu, tahapan kegiatan konsultasi ini juga membahas laporan hasil kegiatan yang sedang dilaksanakan penulis guna mendapat saran perbaikan.

**Gambar 8. Konsultasi dengan Mentor**



b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam tahapan kegiatan pertama, penulis menginput data anggaran program kementerian/lembaga dengan jujur, adil, dan transparan. Pada tahapan kegiatan pengklasifikasian data anggaran program sesuai mitra kerja komisi DPR RI, penulis taat mengikuti aturan pembagian komisi tersebut. Pada tahapan kegiatan desain data, penulis mendesain grafik anggaran program dengan cermat, teliti, dan berupaya memberikan desain data yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan guna mendapat saran perbaikan dari mentor. Tahapan kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab penulis untuk memastikan prosedur yang digunakan sudah cukup baik, memiliki kualitas mutu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.

2) Etika Publik

Etika publik bagi seorang ASN mengacu pada pengamalan kode etik dan kode perilaku ASN dalam bekerja untuk masyarakat. Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melaksanakan kegiatan dengan cermat, disiplin, jujur, dan tidak berpihak. Selain itu, tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor dilakukan dengan sopan untuk menjunjung tinggi standar etika luhur. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan bentuk kerjasama antara penulis dengan Mentor. Seluruh tahapan kegiatan ini dilakukan agar penulis mampu menyediakan informasi yang akurat pada publik.

3) Komitmen Mutu

Komitmen mutu diartikan sebagai pembaruan (inovasi) sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Data RKA K/L merupakan informasi penting yang harus diberikan kepada publik. Dengan informasi ini, masyarakat, khususnya Anggota DPR RI, dapat mengawasi pelaksanaan anggaran terkait program kementerian/lembaga. Namun penyediaan data ini yang terklasifikasi berdasarkan mitra kerja Komisi DPR RI belum pernah diterapkan sebelumnya sehingga diperlukan inovasi

penyajian data yang mudah dan aksesibel. Dalam tahapan kegiatan ini, data anggaran program kementerian/lembaga tidak hanya disusun berdasarkan pembagian mitra kerja komisi, tetapi juga didesain dalam bentuk grafik guna memudahkan pembaca. Hal ini diharapkan dapat menjadi inovasi pemerintah untuk menyajikan data yang mendukung efektivitas dan efisiensi.

#### 4) Manajemen ASN

Salah satu harapan besar pemerintah dalam manajemen ASN saat ini ialah bagaimana menciptakan ASN yang memiliki kompetensi dan andal sesuai dengan tugas fungsi jabatannya. Tugas Analis APBN salah satunya yaitu memberikan informasi kepada publik baik terkait APBN maupun anggaran pemerintah. Tugas ini belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga tujuan kegiatan ini ialah menyediakan informasi kepada publik terkait perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang belum dijalankan Pusat Kajian Anggaran. Data perkembangan anggaran ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Pada tahapan pengolahan data, penulis meningkatkan wawasan terkait program-program yang kini dijalankan pemerintah dan meningkatkan kedisiplinan serta kecermatan dalam proses input data. Dalam tahapan pengklasifikasi data berdasarkan mitra kerja Komisi DPR RI, penulis meningkatkan pengetahuan terkait ruang lingkup serta kementerian/lembaga sesuai dengan mitra kerja komisi. Pada tahapan desain data, penulis meningkatkan kompetensi desain data menggunakan Microsoft Excel agar data yang disajikan menarik dan mudah dipahami oleh publik. Pada tahapan konsultasi dengan mentor, penulis meningkatkan kemampuan kerjasama dan koordinasi bersama mentor untuk menerima masukan dan saran perbaikan atas hasil kegiatan. Seluruh tahapan kegiatan ini sejalan dengan fungsi utama manajemen ASN yaitu menciptakan ASN yang kompeten dibidangnya.

#### 5) Pelayanan Publik

Tujuan utama pelayanan publik ialah memberikan pelayanan terbaik kepada penerima layanan yaitu masyarakat maupun organisasi. Pelayanan publik yang baik ini harus mengandung unsur-unsur seperti mudah, cepat, efektif, dan efisien. Tujuan utama kegiatan ini ialah

penyediaan data anggaran program kementerian/lembaga. Kegiatan ini dilalui melalui tahapan kegiatan pengolahan, pengklasifikasian, dan desain data agar penerima layanan dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Pengklasifikasian data diharapkan dapat memudahkan Komisi DPR RI sehingga proses perumusan kebijakan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Sementara itu, tahapan kegiatan desain data dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui data perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang mudah dipahami dan akses informasi yang cepat. Seluruh tahapan kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik ASN kepada organisasi serta masyarakat.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Pengolahan data RKA K/L pada tingkat program merupakan bentuk pertanggungjawaban Analis APBN dalam menyediakan informasi khususnya bagi Anggota DPR RI maupun masyarakat umum. Dengan penyediaan data yang diklasifikasikan berdasarkan mitra kerja Komisi DPR RI, maka diharapkan dapat memudahkan Komisi DPR RI dalam mendukung fungsi anggaran.

2) Profesional

Melalui kegiatan pengolahan dan desain data RKA K/L ini, Penulis dapat meningkatkan wawasan terkait pengelolaan anggaran pada tingkat program kementerian/lembaga. Selain itu, adanya tahapan kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi dalam mengolah dan mendesain data. Hasil kegiatan ini dapat memudahkan organisasi dalam penyusunan Analisis yang terkait anggaran kementerian/lembaga maupun APBN sehingga mendukung DPR RI akan fungsi anggaran. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN yaitu menyediakan informasi sehingga dapat menjadi supporting system Anggota DPR RI yang profesional.

3) Integritas

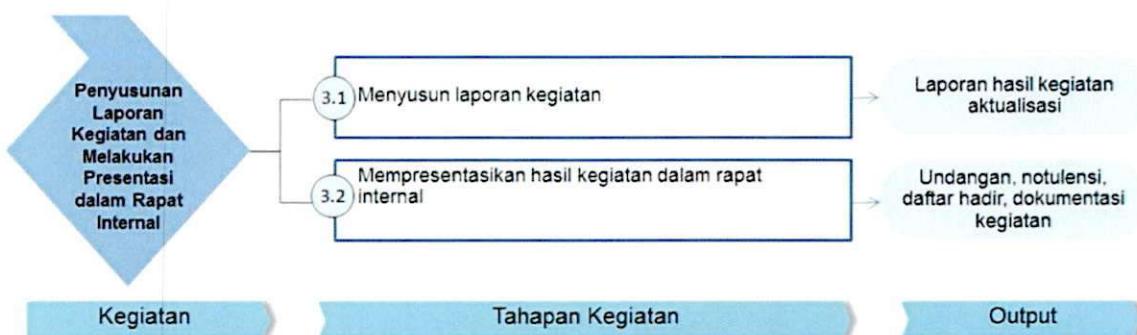
Dalam kegiatan ini, data yang digunakan diperoleh dari instansi pemerintah. Tahapan input data dan pengolahannya dilakukan dengan jujur, adil, disiplin, dan dilakukan secara transparan. Selain itu, tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor juga berlandaskan pada nilai-nilai

kegiatan konsultasi dengan mentor juga berlandaskan pada nilai-nilai moral yaitu kejujuran serta menepati arahan atau masukan dari mentor. Dengan adanya kegiatan ini, maka penulis mampu mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dan mendorong nilai organisasi yaitu integritas.

### 1. Kegiatan 3

Kegiatan 3 yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal. Kegiatan 3 ini terdiri dari 2 (dua) tahapan kegiatan.

**Gambar 1. Kegiatan 3 Aktualisasi**



Tahapan kegiatan pertama dalam Kegiatan 3 aktualisasi ini adalah penyusunan laporan kegiatan aktualisasi yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan laporan. Rangkaian tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil kegiatan, yaitu data-data RKA K/L melalui rapat internal yang diselenggarakan di Pusat Kajian Anggaran dan dihadiri oleh Analis APBN. Tujuan tahapan kegiatan ini untuk mensosialisasikan hasil kegiatan kepada Analis APBN dan menerima kritik maupun saran guna perbaikan hasil kegiatan sebelum diunggah ke dalam website Pusat Kajian Anggaran. Output dalam tahapan kegiatan ini antara lain undangan presentasi dalam rapat internal; notulensi kegiatan; dokumentasi kegiatan; dan laporan kegiatan yang telah diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran dalam rapat internal. Seluruh output ini akan dilampirkan di akhir laporan ini.

**Tabel 1. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualiasi 3**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1.	Akuntabilitas	Pelayanan publik	Akuntabel
2.	Etika publik	-	Profesional
3.	-	-	Integritas

a) Tahapan Kegiatan

b. Menyusun laporan kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan Penulis disertai pendampingan dan pengawasan dari Mentor dan Coach. Laporan kegiatan ini berisikan tentang rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan oleh Penulis, yaitu mulai dari pengumpulan data, pengolahan data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan mitra kerja di 11 (sebelas) Komisi DPR RI, serta database yang dapat diakses di website Pusat Kajian Anggaran. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Penulis kepada unit organisasi atas kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dan akan diserahkan kepada atasan. Adapun output dari kegiatan ini ialah catatan hasil penyerahan laporan aktualisasi kepada pimpinan dan mentor.

c. Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal

Hasil kegiatan aktualisasi yaitu data RKA K/L yang telah diklasifikasikan sesuai dengan mitra kerja di 11 Komisi DPR RI. Presentasi ini dilakukan dalam rapat internal yaitu Pusat Kajian Anggaran yang dihadiri oleh Analis APBN di ruang rapat Pusat Kajian Anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menerima tanggapan, kritik, dan saran terkait database yang akan ditampilkan pada website Pusat Kajian Anggaran. Output dari tahapan kegiatan ini ialah undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi kegiatan presentasi yang akan dilampirkan pada akhir laporan ini.

**Gambar 10. Kegiatan Presentasi dalam Rapat Internal**



**Gambar 11. Kegiatan Presentasi dalam Rapat Internal**



**b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

**1) Akuntabilitas**

Tahapan kegiatan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Penulis dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kejelasan target. Selain itu, tahapan pelaksanaan presentasi hasil kegiatan dalam rapat internal bertujuan untuk memastikan proses kegiatan yang telah dilakukan cukup baik. Presentasi ini terbuka akan kritik dan saran dari Analis APBN untuk memastikan hasil kegiatan layak sebelum dipublikasikan dalam website. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Penulis dalam memberikan hasil kegiatan terbaik dalam mendukung fungsi anggaran.

## 2) Etika Publik

Salah satu nilai dasar etika publik bagi seorang ASN yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan ini ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal. Tahapan kegiatan penyusunan laporan kegiatan dilakukan dengan cermat, disiplin, sesuai dengan kaidah penulisan laporan, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Adanya kegiatan presentasi melalui rapat internal yang melibatkan Analis APBN juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar Analis APBN dalam bersinergi memberikan dukungan fungsi anggaran.

## 3) Pelayanan Publik

Prosedur pelayanan publik harus mencakup unsur-unsur pelayanan publik guna mencapai kepuasan publik ataupun organisasi selaku penerima layanan. Pada tahapan penyusunan laporan kegiatan, unsur yang terkandung ialah akuntabel, dimana proses penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan serta organisasi. Dalam tahapan kegiatan presentasi internal, mengandung unsur partisipatif karena melibatkan pihak lain yaitu Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Partisipasi ini membahas proses dan hasil kegiatan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan sebelum sampai pada tahap kegiatan akhir. Unsur partisipatif ini diharapkan dapat mendukung hasil kegiatan yang lebih bermutu dan optimal kepada publik.

## c) Penguatan Nilai Organisasi

### 1) Akuntabel

Rangkaian pelaksanaan kegiatan aktualiasasi perlu dipertanggungjawabkan kepada organisasi. Dalam kegiatan ini, bentuk pertanggungjawaban penulis ialah melalui laporan hasil kegiatan serta mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal. Hal ini mendukung nilai organisasi yaitu Akuntabel, dimana penulis mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses yang telah dilakukan guna mencapai hasil kegiatan yang optimal.

2) Profesional

Profesionalitas organisasi dikaitkan dengan prosedur kegiatan yang terbuka serta bukti pertanggungjawaban atas sebuah kegiatan. Indikator penilaian suatu kegiatan ini haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi ASN yang sesuai dengan bidangnya. Melalui kegiatan ini, Analis APBN dapat meningkatkan kompetensi akan penyusunan laporan kegiatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan. Pada tahapan kegiatan melaksanakan presentasi rapat internal, penulis juga mendorong nilai profesional organisasi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain, yaitu seluruh Analis APBN, untuk memberikan informasi terkait anggaran program kepada publik. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN yaitu menyediakan informasi sehingga dapat menjadi supporting system Anggota DPR RI yang profesional.

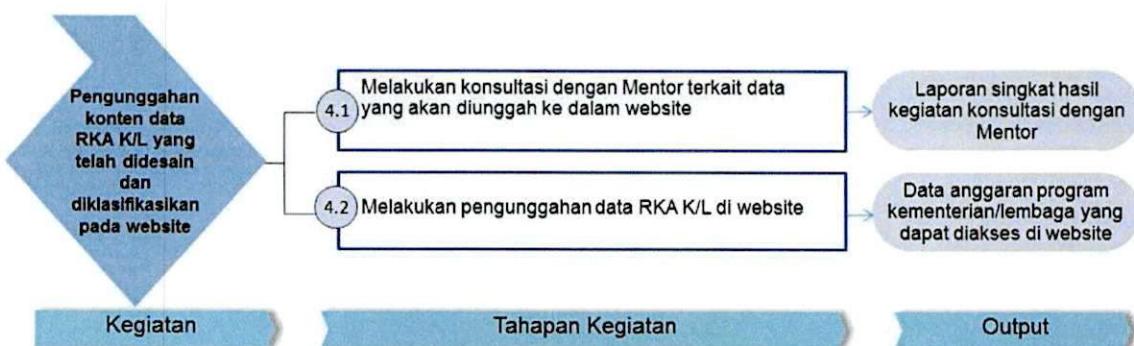
3) Integritas

Integritas merupakan sifat jujur, tegas, dan mendukung sifat profesional dalam berperilaku. Dalam penyusunan laporan, penulis melaporkan setiap proses kegiatan dengan jujur dan dapat dipercaya. Pada tahapan kegiatan presentasi dalam rapat internal, penulis berkomitmen dan bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Seluruh kegiatan ini dilakukan guna menjaga sinergitas Analis APBN dalam menjalankan fungsi anggaran.

**4. Kegiatan 4**

Kegiatan 4 yaitu melakukan pengunggahan konten data RKA K/L yang telah didesain dan diklasifikasikan pada website. Kegiatan 4 ini terdiri dari 2 (dua) tahapan kegiatan.

**Gambar 12. Kegiatan 4 Aktualisasi**



**Tabel 6. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 4**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan ASN	Nilai Organisasi
1.	Akuntabilitas	Whole of government	Akuntabel
2.	Nasionalisme	Pelayanan publik	Profesional
3.	Anti Korupsi	-	Integritas

Rangkaian kegiatan terakhir dari aktualisasi ini adalah mengunggah konten data RKA K/L ke dalam website puskajianggaran.dpr.go.id. Pengunggahan data yang terintegrasi berdasarkan mitra kerja di Komisi DPR RI akan bermanfaat baik bagi Analis APBN, Anggota DPR RI, maupun masyarakat umum. Dengan transparansinya data anggaran ini, seluruh pihak dapat mengawasi rencana anggaran tingkat program oleh kementerian/lembaga.

**a) Tahapan Kegiatan**

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) tahapan kegiatan, yaitu:

- 4.1 Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait data-data yang akan diunggah ke dalam website

Tahapan kegiatan ini merupakan pemeriksaan data-data yang dilakukan oleh Mentor dan Penulis sebelum tahapan pengunggahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data telah akurat dan layak untuk diunggah ke dalam website. Pemeriksaan ini meliputi data yang telah diperbaiki berdasarkan masukan saat kegiatan presentasi. Adapun output dalam tahapan kegiatan ini yaitu laporan

singkat hasil konsultasi dengan mentor terkait pemeriksaan akhir serta persetujuan data yang akan dilampirkan pada akhir laporan.

**Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor**



#### 4.2 Melakukan pengunggahan data-data RKA K/L di website

Pada tahapan kegiatan terakhir ini, Penulis mengunggah data RKA K/L di website puskajianggaran.dpr.go.id. Data yang diunggah ini telah mendapat persetujuan dari mentor serta sesuai dengan arahan-arahan Analis APBN pada kegiatan presentasi. Seluruh data yang diunggah pada website ini dapat diakses secara umum. Hal ini tentunya bertujuan agar data RKA K/L tidak hanya bermanfaat bagi Anggota DPR RI ataupun Analis APBN, tetapi juga kepada masyarakat umum guna meningkatkan pengetahuan masyarakat akan informasi anggaran program kementerian/lembaga.

#### b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

##### 1) Akuntabilitas

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik yang mendukung nilai akuntabilitas dalam konteks, yaitu adanya transparansi dan akses informasi kepada publik. Transparansi dan akses informasi berarti setiap masyarakat dapat memperoleh informasi terkait penyelenggaraan program pemerintah secara mudah dan cepat. Pada tahapan pengunggahan data, penulis mengikuti prosedur yang berlaku dan data yang diunggah sesuai dengan hasil yang disarankan oleh Analis APBN dalam tahap

kegiatan presentasi internal. Hal ini untuk memastikan validitas dan kelaikan informasi sebelum diunggah pada website. Selain memberikan informasi kepada publik, penyediaan data ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Analis APBN yang mendukung DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran.

2) Nasionalisme

Kegiatan penyediaan data RKA di seluruh kementerian/lembaga ini merupakan bentuk tanggung jawab instansi pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan penyediaan data ini menjadi upaya pemerintah untuk memelihara ketertiban dan disiplin menjalankan amanah rakyat. Walaupun setiap kementerian/lembaga memiliki fungsi dan program yang berbeda, tersedianya data yang terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme oleh instansi pemerintah guna mewujudkan negara yang sesuai dengan cita-cita nasional.

3) Anti Korupsi

Belum terpublikasinya informasi terkait perkembangan anggaran program kementerian/lembaga menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program yang diselenggarakan pemerintah. Melalui kegiatan terpublikasinya data perkembangan RKA K/L, maka masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan anggaran dan instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya. Transparansi data anggaran program kementerian/lembaga menunjukkan sikap jujur dan mandiri kementerian/lembaga dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dari sisi instansi pemerintah, transparansi data ini akan menjadi perwujudan sikap, meningkatkan kesadaran anti korupsi, dan semakin menjauhi tindakan korupsi.

4) Whole of Government

WoG dikenal sebagai pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan

kebijakan sesuai dengan cita-cita nasional. Melalui tahapan kegiatan pengunggahan data anggaran program kementerian/lembaga di website Pusat Kajian Anggaran, maka informasi terkait anggaran pemerintah ini dapat diakses dengan mudah oleh Anggota DPR RI, instansi pemerintah lainnya, maupun masyarakat. Kemudahan akses informasi ini nantinya akan memudahkan Anggota DPR RI pada saat pengambilan keputusan terkait anggaran program kementerian/lembaga. Hal ini merupakan bentuk kolaboratif antara DPR RI dengan kementerian/lembaga sesuai mitra kerja komisi untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar, yaitu menjalankan fungsi anggaran yang adil dan transparan.

5) Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan keperluan masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Bentuk pelayanan dalam kegiatan ini ialah penyediaan data anggaran program kementerian/lembaga kepada publik serta kepada Anggota DPR RI selaku penerima pelayanan utama. Melalui keterbukaan akses data terkait anggaran program kementerian/lembaga, maka kegiatan ini mendukung prinsip aksesibel. Prinsip aksesibel ini berarti informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun Analis APBN.

c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Penyediaan data anggaran program kementerian/lembaga melalui website mendukung transparansi informasi publik. Dengan adanya kegiatan ini, setiap masyarakat turut serta mengawasi pelaksanaan program dari sisi anggaran kementerian/lembaga dengan akses yang mudah. Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin membutuhkan informasi terkait anggaran program ini.

## 2) Profesional

Salah satu tugas Analis APBN yaitu menyediakan informasi terkait anggaran pemerintah baik kepada DPR RI maupun kepada publik. Melalui kegiatan publikasi data RKA K/L di website ini, maka penulis menjalankan tugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Terlebih lagi, informasi ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi Anggota DPR RI dalam perumusan kebijakan terkait anggaran pemerintah. Dengan tersedianya data tersebut, maka penulis dapat meningkatkan profesionalitas Analis APBN dalam mendukung fungsi anggaran.

## 3) Integritas

Integritas merupakan sifat jujur, tegas, dan mendukung sifat profesional dalam berperilaku. Kegiatan penyediaan data RKA K/L ini dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat atas rencana pelaksanaan anggaran program yang dijalankan kementerian/lembaga. Sumber data yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama Anggota DPR RI yang menjalankan fungsi anggaran secara langsung.

## 5. STAKEHOLDER

**Tabel 7. Stakeholder Aktualisasi**

Internal	Eksternal
Staf Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota DPR RI dan Staf Komisi DPR RI</li><li>- Masyarakat umum</li></ul>

## 6. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, kendala yang dihadapi penulis antara lain:

- Adanya kode program yang sama namun fungsi program yang berbeda menyebabkan proses penginputan data sedikit lebih lama dari jadwal

- kegiatan. Namun kendala ini dapat diatasi dengan menerapkan cermat, disiplin, dan fokus menyelesaikan proses penginputan data hingga selesai sebelum menginput data anggaran instansi lainnya.
- Adanya perbedaan program kementerian/lembaga setiap tahun menyebabkan pada beberapa program tidak tersedia datanya. Hal ini cukup menghambat proses penginputan data. Namun kendala ini diatasi dengan tetap mencantumkan program walaupun tidak tersedia anggarannya.
  - Sumber data anggaran program kementerian/lembaga tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 diperoleh dari lampiran peraturan presiden yang telah memiliki kekuatan hukum. Namun pada data tahun anggaran 2020, penulis masih menggunakan data yang bersumber dari Buku III Himpunan RKA K/L Tahun Anggaran 2020. Data ini masih dapat berubah seiring dengan rapat antara DPR RI dengan instansi pemerintah. Namun data ini tetap digunakan oleh penulis sebagai gambaran perkembangan anggaran program kementerian/lembaga. Untuk mengatasi masalah ini, penulis akan menyesuaikan kembali data anggaran program kementerian/lembaga berdasarkan peraturan presiden tentang rincian APBN yang akan disahkan pada akhir tahun 2019. Dengan demikian, keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

## 7. ANALISIS DAMPAK

### 1) HASIL INISIATIF

Dari level individu, apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka penulis mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terkait program dan anggaran kementerian/lembaga yang menjadi sumber pengetahuan bagi penulis. Selain itu, kemampuan dalam mengolah dan mengkompilasi data, dan mendesain kompilasi data tersebut. Namun jika aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka penulis hanya dapat meningkatkan pengetahuan terkait program dan anggaran kementerian/lembaga, namun tidak dengan kemampuan pengolahan, kompilasi, dan desain data.

Untuk level unit kerja, apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka terintegrasinya data RKA K/L akan sangat memudahkan Analis APBN dalam menyusun Analisis APBN, terutama jika isu yang terkait ialah

program-program dari kementerian/lembaga sehingga waktu penyusunan lebih efisien. Namun jika aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan analisis yang terkait program kementerian/lembaga menjadi tidak efisien karena harus mencari lagi data-data yang dibutuhkan.

Untuk level unit organisasi, apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka seluruh pihak termasuk Anggota DPR RI dapat mengakses data RKA K/L secara mudah yang tentunya dapat bermanfaat ketika akan dilaksanakan rapat kerja dengan pemerintah. Namun jika aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka Anggota DPR RI harus mencari data-data anggaran kementerian/lembaga yang dibutuhkan kembali sehingga prosedur persiapan rapat menjadi kurang efisien.

## 2) NILAI DASAR ANEKA

### a. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, dalam proses kegiatan harus dilandasai dengan kejujuran, netral, adil, transparan, dan konsisten. Sebagai seorang ASN, tugas dan fungsi yang dijalankan harus memiliki kejelasan target dan bertujuan semata-mata untuk kepentingan publik. Jika suatu kegiatan tidak didasari pada nilai akuntabilitas, maka hasil kegiatan dapat dikatakan salah dan tidak menjawab tujuan utama kegiatan tersebut. Pada kegiatan ini, tujuan utama penulis ialah menyediakan data perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang dapat diakses oleh publik. Kegiatan ini berkaitan erat dengan transparansi data dan akses informasi kepada publik. Untuk memberikan hasil yang baik dari kegiatan, maka dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan sifat kejujuran, adil, dan transparan.

Jika pada tahapan kegiatan pengumpulan sumber data, penulis tidak menganut nilai akuntabilitas, penulis mungkin menggunakan sumber data non pemerintah. Hal ini berdampak pada kualitas data yang digunakan dan memberikan informasi yang kurang valid. Sementara pada tahapan kegiatan pengolahan data, apabila penulis tidak menganut nilai akuntabilitas, maka penulis dapat dengan sengaja memanipulasi data tertentu demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Hal ini tentunya

dapat berakibat fatal pada validitas data dan berdampak negatif pada kredibilitas organisasi. Jika penulis mengabaikan nilai akuntabilitas dalam kegiatan ini, maka penulis menghambat tugas organisasi, yaitu Pusat Kajian Anggaran, dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran kepada DPR RI. Untuk itu, nilai akuntabilitas sangat penting diterapkan pada setiap tahapan kegiatan guna mencapai hasil kegiatan yang bermanfaat.

b. Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah air yang didasari pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dianut dari Pancasila antara lain rasa hormat menghormati, amanah, adil, menjunjung tinggi persamaan derajat dan persatuan, serta berjuang dalam memelihara ketertiban guna mencapai kepentingan nasional. Selain itu, nilai Pancasila sangat menjunjung tinggi kerjasama kelompok melalui musyawarah sehingga setiap keputusan harus didasari kesepakatan bersama. Pengamalan nilai Pancasila ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi ASN yang harus mampu mencapai tujuan nasional.

Sama halnya dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tiap pelaksanaan tahapan kegiatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan mampu menjawab kebutuhan organisasi ataupun masyarakat dengan cara melibatkan partisipasi pihak lain. Untuk itu, dalam tahapan kegiatan ini dilakukan konsultasi dan diskusi bersama pimpinan dan mentor. Tujuan dari konsultasi ini agar penulis mendapatkan kritik dan saran demi kebaikan hasil kegiatan. Jika penulis mengabaikan nilai nasionalisme dalam kegiatan ini, maka penulis hanya akan menjalankan kegiatan atas dasar kepentingan pribadi tanpa melibatkan pihak lain yang dapat mendorong penulis untuk menciptakan hasil kegiatan terbaik. Penulis tidak akan mendapatkan masukan dari pimpinan dan mentor yang lebih berpengalaman sehingga hasil kegiatan tidak mampu menjawab tujuan utama kegiatan. Untuk itu, setiap pelaksanaan kegiatan ini harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme agar tujuan utama kegiatan dapat tercapai.

### c. Etika Publik

Etika publik bagi seorang ASN mengacu pada pengamalan kode etik dan kode perilaku ASN dalam bekerja untuk masyarakat. Etika publik ASN menjunjung tinggi nilai kejujuran, bertanggung jawab, integritas, cermat, disiplin, dan mengacu pada nilai etika luhur. Setiap ASN harus mampu taat pada peraturan perundang-undangan termasuk kode etik dan kode perilaku ASN, misalnya taat perintah dan senantiasa menjaga rahasia negara. Jika ASN mampu mengamalkan nilai etika publik, maka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan lebih mudah dicapai dan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melaksanakan tiap kegiatan dengan mengamalkan nilai-nilai etika publik. Adanya tahapan kegiatan yaitu penyusunan data anggaran program kementerian/lembaga pada tingkat program membutuhkan kecermatan dan disiplin yang tinggi. Seluruh data yang disusun ini dilakukan dengan jujur, transparan, adil, dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan prosedur, menaati kaidah penulisan, serta tidak melanggar kode etik dan kode perilaku ASN. Selain itu, pada tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor dilakukan dengan sopan untuk menjunjung tinggi standar etika luhur. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan bentuk kerja sama antara penulis dengan Mentor. Setiap ASN diharuskan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Nilai ini juga diterapkan pada kegiatan penulis berupa adanya bentuk pertanggungjawaban yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal.

Nilai etika publik harus diamalkan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada kegiatan ini, jika penulis mengabaikan nilai sopan santun terhadap pimpinan dan mentor, maka penulis menghambat komunikasi organisasi dan tidak mampu bekerja sama dalam organisasi. Jika nilai ini diabaikan, maka penulis hanya akan menjalankan kegiatan berdasarkan kepentingan pribadi dan justru mengabaikan kepentingan organisasi. Selain itu, jika penulis tidak mengamalkan nilai etika publik, maka penulis berarti melanggar kode etik

dan kode perilaku ASN yang menjunjung tinggi sikap tanggung jawab dan patuh menerima konsekuensi dari suatu kegiatan. Dampaknya, penulis tidak akan bersemangat melaksanakan kegiatan dan cenderung fokus hanya pada hasil kegiatan, bukan pada kualitas dan tujuan utama dari kegiatan. Untuk itu, nilai etika publik sangat penting diamalkan pada seluruh kegiatan ini guna mencapai hasil kegiatan terbaik. Hal ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi penulis untuk juga mengamalkan nilai etika publik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Analis APBN.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu diartikan sebagai pembaruan (inovasi) sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien namun tetap berorientasi pada mutu. Nilai komitmen mutu memperhatikan efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan. Selain itu, komitmen mutu dikaitkan dengan inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan. Jika nilai efektivitas dan efisiensi diabaikan, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja dan menurunkan kredibilitas institusi. Hal ini akan menghambat pencapaian tujuan utama kebijakan.

Fokus kegiatan dalam aktualisasi ini ialah menyediakan data-data RKA K/L yang dapat diakses melalui website Pusat Kajian Anggaran. Data yang disajikan ini telah berbentuk rekapitulasi pada tingkat program kementerian/lembaga yang diklasifikasikan berdasarkan lingkup komisi di DPR RI. Tujuan penulis melalui kegiatan ini yaitu agar baik Anggota DPR RI serta masyarakat dapat mengakses informasi terkait perkembangan anggaran program kementerian/lembaga dengan mudah, melalui penyajian data yang berbeda dengan instansi lainnya. Hal ini merupakan bentuk inovasi karena belum pernah diterapkan oleh instansi lain. Jika aktualisasi ini dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun jika penulis tidak menganut nilai-nilai komitmen mutu, penyajian data di website tidak akan berbeda dengan penyajian data yang selama ini diterapkan instansi lain. Hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan anggaran program dan mengurangi minat masyarakat untuk mengawasi perkembangan anggaran program kementerian/lembaga. Dengan

demikian, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai komitmen mutu, salah satunya inovasi pada kegiatan ini. Dengan pengamalan nilai inovasi, maka tujuan utama kegiatan lebih mudah dicapai.

e. Anti Korupsi

Kesadaran anti korupsi yang harus diyakini oleh setiap ASN. Kesadaran anti korupsi ini dapat diciptakan dengan menanamkan nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, adil, dan transparan. Pengamalan nilai ini melalui pelayanan publik yang dilakukan dengan jujur, berintegritas, adil, dan menyampaikan informasi dengan transparan kepada masyarakat. Dengan pengamalan nilai ini, maka ASN juga harus mampu bertanggung jawab menanggung semua konsekuensi atas setiap perbuatannya.

Adanya transparansi data merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan program pemerintahan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran anti korupsi instansi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah. Nilai anti korupsi ini sangat penting diamalkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Jika nilai ini tidak diamalkan, maka pencapaian tujuan negara yang menjunjung kesejahteraan dan keadilan sosial akan sulit tercapai.

ASN sebagai pelaksana kebijakan perlu menerapkan nilai anti korupsi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai Analis APBN, penulis mempunyai tugas yang salah satunya menyediakan informasi kepada publik terkait dengan anggaran. Hal ini mendukung aspek transparansi yang diyakini dapat berpengaruh pada kepercayaan publik. Dalam kegiatan aktualisasi ini, penulis memberikan informasi kepada publik terkait data perkembangan anggaran program kementerian/lembaga. Tahapan kegiatan ini mendorong penulis untuk memberikan informasi yang aktual, transparan, dan adil. Untuk itu, kejujuran dan disiplin menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proses kegiatan ini. Jika penulis tidak mengamalkan nilai tersebut, maka penulis akan memberikan informasi yang tidak sah dan justru merugikan pihak-pihak tertentu. Kegagalan penulis pun menghambat tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu melayani publik dengan informasi yang akurat. Jika

hal ini terjadi, maka akan mengurangi kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Untuk itu, penulis harus mengamalkan nilai anti korupsi ini karena akan meningkatkan kesadaran anti korupsi yang diharapkan setiap ASN semakin menjauhi perilaku korupsi.

## 8. JADWAL KEGIATAN

**Tabel 8. Jadwal Kegiatan Aktualisasi**

Kegiatan	Agustus 2019	September 2019				Oktober 2019	
		Pekan					
		IV	I	II	III		
<b>Pengumpulan data-data RKA K/L</b>							
1.1 Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor terkait data-data kementerian/lembaga yang akan disajikan dalam website							
1.2 Mengumpulkan sumber data RKA K/L dari tahun 2018-2020							
<b>Pengolahan data yang disusun pada tingkat program kementerian/lembaga</b>							
2.1 Mengolah dan merekap data RKA K/L yang disusun pada tingkat program							
2.2 Mengklasifikasikan data sesuai dengan pembagian mitra kerja di 11 Komisi DPR RI							
2.3 Mendesain database RKA K/L dalam bentuk modifikasi grafik							
2.4 Melakukan konsultasi dengan mentor untuk memastikan rekapitulasi RKA K/L telah layak disajikan							
<b>Penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal</b>							
3.1 Menyusun laporan kegiatan							
3.2 Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal							
<b>8.1.1.4 Pengunggahan konten data RKA K/L pada website</b>							
4.1 Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait data-data yang akan diunggah ke dalam website							
4.2 Melakukan pengunggahan data-data RKA K/L di website							

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penyediaan data RKA K/L pada website Pusat Kajian Anggaran merupakan proyek aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari kerja. Proyek aktualisasi ini telah melalui beberapa proses, dari perumusan isu-isu strategis yang terjadi di Pusat Kajian Anggaran, kemudian pemilihan isu dengan teknik analisis USG yang pada akhirnya terpilihlah isu kegiatan yaitu belum tersedianya data RKA K/L di website Pusat Kajian Anggaran. Untuk memberikan dukungan fungsi anggaran yang lebih optimal, maka penyediaan data RKA K/L yang dapat diakses di website Pusat Kajian Anggaran sangat diperlukan. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan sangat memudahkan Analis APBN dalam penyusunan Analisis APBN yang terkait dengan program kementerian/lembaga. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Masing-masing kegiatan ini memiliki keterkaitan terhadap mata pelatihan nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data RKA K/L, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik dan Whole of Government (WoG).
2. Pengolahan data yang disusun pada tingkat program kementerian/lembaga, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik.
3. Penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas dan etika publik. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik.
4. Pengunggahan konten data RKA K/L di website, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Kegiatan ini

juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu Whole of Governement (WoG) dan pelayanan publik.

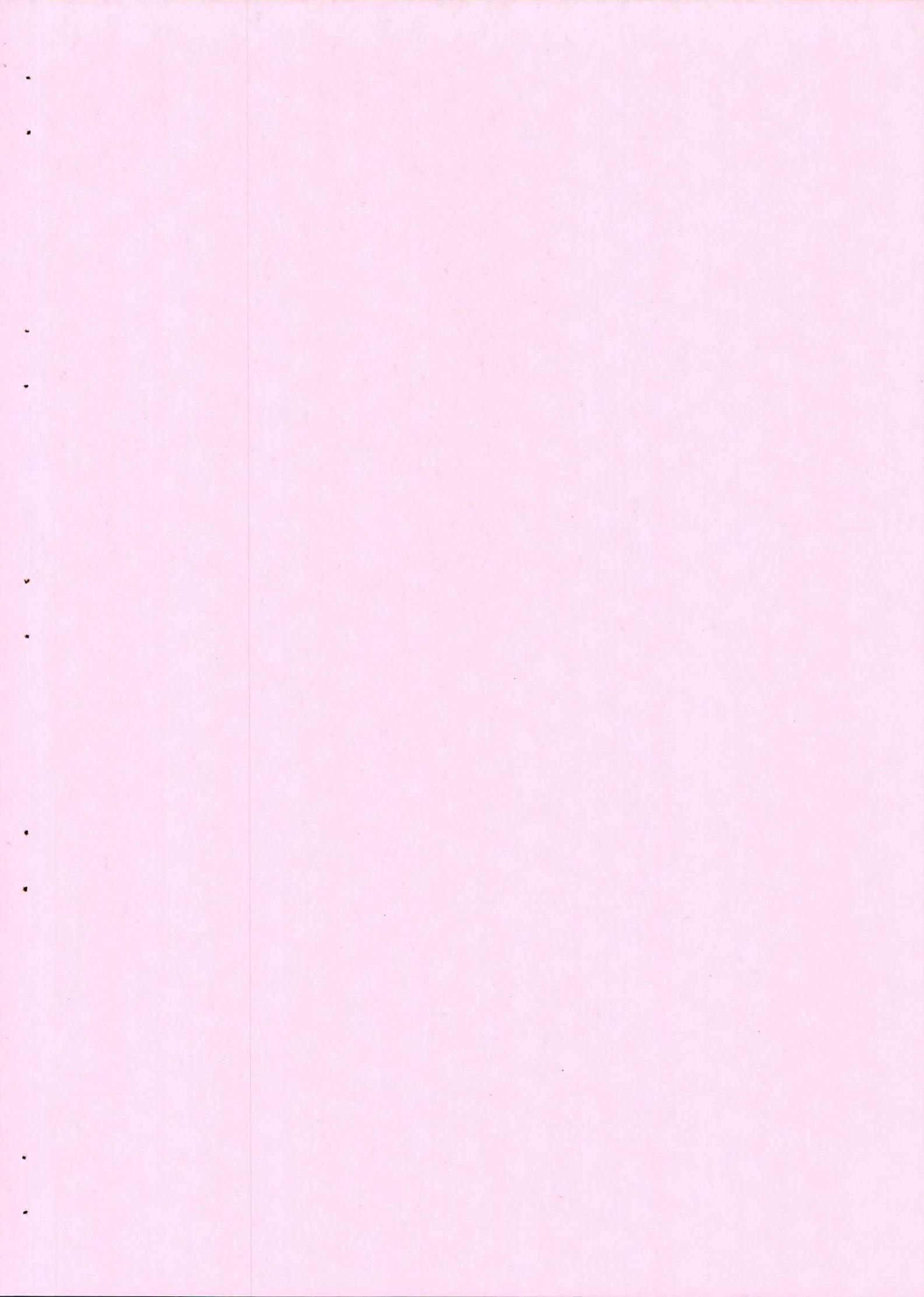
Output dari proyek aktualisasi ini adalah berupa data RKA K/L tahun anggaran 2018-2020 yang dapat diakses melalui website <https://puskajianggaran.dpr.go.id/> pada bagian menu 'Data Indikator'. Harapannya, dengan dilaksanakannya proyek aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi bagi unit kerja dan meningkatkan dukungan keahlian terkait fungsi anggaran kepada Anggota DPR RI.

## B. SARAN

Prioritas nasional yang dicapai melalui kebijakan program kementerian/lembaga setiap tahun terus berkembang. Untuk mengetahui program-program yang dijalankan oleh setiap kementerian/lembaga maka diperlukan penyajian data anggaran pada tingkat program secara terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Adanya penyediaan data di website puskajianggaran.dpr.go.id menjalankan salah satu tugas Analis APBN yaitu memberikan informasi kepada publik yang terkait dengan anggaran. Namun, kebijakan anggaran program kementerian/lembaga cenderung berubah setiap tahunnya. Untuk tetap memberikan informasi kepada publik terkait data anggaran yang akurat, maka data anggaran tingkat program kementerian/lembaga setiap tahun perlu diupdate setiap tahunnya. Untuk perbaikan kedepannya, penyediaan data yang ditampilkan bisa dikembangkan. Misalnya, tampilan grafik yang hanya dapat dipilih pada tingkat program, mungkin dapat dikembangkan menjadi fungsi program. Lebih lanjut, penyediaan data seperti ini juga dapat diterapkan pada data-data lainnya seperti data penerimaan negara, transfer ke daerah dan dana desa, ataupun pembiayaan negara. Dengan penyediaan data yang lebih variatif dan update ini diharapkan dapat mengoptimalkan Pusat Kajian Anggaran dalam mendukung fungsi anggaran DPR RI.

Untuk penyelenggara, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar sudah berjalan dengan baik dari awal pelaksanaan teknis sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Namun untuk meningkatkan pelaksanaan tersebut, maka diperlukan koordinasi internal yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang lebih baik guna mendukung kelancaran

kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar di masa mendatang. Ketika kebijakan telah ditentukan dalam koordinasi internal, maka perlu dikomunikasikan dengan lebih jelas kepada seluruh peserta Latsar agar tidak terjadi kesalahan. Dengan koordinasi yang baik, maka kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar akan berjalan lebih optimal.



## **LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN KEGIATAN 1**

- 1.1 Laporan singkat hasil konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor
- 1.2 Sumber data RKA K/L tahun anggaran 2018-2020 yang digunakan

## Lampiran Tahapan Kegiatan 1.1 Laporan Singkat Hasil Konsultasi dengan Kepala Pusat



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KONSULTASI DENGAN KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019  
Pukul : 09.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang 602 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Konsultasi Terkait Rencana Aktualisasi  
Pimpinan : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### I. PENDAHULUAN

Salah satu tahapan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Deasy Dwi Ramlyu, S.E yaitu melaksanakan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait dengan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang telah direncanakan dalam rancangan aktualisasi. Agenda konsultasi ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si berserta 5 (lima) CPNS Analis APBN Latsar Angkatan III lainnya terkait kegiatan aktualisasi yang telah direncanakan oleh masing-masing Analis APBN. Agenda konsultasi ini dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 pada pukul 09.30 WIB.

### II. POKOK-POKOK PEMERICARAAN

Selama ditempatkan di unit kerja yaitu Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI, Penulis menemukan beberapa permasalahan atau isu di unit kerja yang perlu diperbaiki. Salah satu permasalahan yang dimaksud yaitu belum tersedianya data terkait anggaran kementerian/lembaga di website Pusat Kajian Anggaran. Padahal, data anggaran program kementerian/lembaga sangat penting untuk digunakan dalam penyusunan Analisis APBN ataupun tugas-tugas lain yang terkait pendampingan rapat anggaran yang diselenggarakan Komisi DPR RI dengan Pemerintah.

Dari berbagai isu yang disoroti Penulis, dalam penentuan isu prioritas, Penulis menggunakan teknik analisis USG. Dari teknik tersebut, maka terpilih isu pertama yaitu belum tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) di website resmi Pusat Kajian Anggaran. Dengan terpilihnya isu tersebut, maka produk akhir aktualisasi Penulis yaitu penyediaan data RKA K/L pada website Pusat Kajian Anggaran, yaitu <https://puskajiananggaran.dpr.go.id/> pada tingkat program kementerian/lembaga tahun anggaran 2018 dan 2019. Produk akhir aktualisasi ini diharapkan dapat memudahkan Analis APBN dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI yang terkait dengan fungsi anggaran.

Pada sesi konsultasi pertama ini, topik pembahasan yang dilaksanakan terkait rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Penulis. Adapun rencana tahapan-tahapan kegiatan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

Matriks Jadwal Tahapan Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengumpulan data RKA kementerian/lembaga												
2.	Pengolahan data RKA per program kementerian/lembaga												
3.	Penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal												
4.	Penyediaan rekapitulasi data RKA kementerian/lembaga pada website Pusat Kajian Anggaran												

Kegiatan pertama dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Agustus 2019. Dalam kegiatan ini, tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu, melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran serta Mentor terkait data-data yang diperlukan serta kendala yang mungkin dihadapi dalam proses Kegiatan; dan melakukan pengumpulan data RKA K/L yang terkait pada tingkat program kementerian/lembaga. Sejauh ini, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor. Dari tahapan ini, Penulis mendapatkan arahan untuk merekapitulasi data anggaran program kementerian/lembaga pada tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2018, dibutuhkan data realisasi anggaran program kementerian/lembaga. Untuk Kegiatan 1, tahapan kegiatan dibutuhkan melampirkan output yaitu Laporan Singkat terkait Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor, dokumentasi konsultasi, serta data anggaran program kementerian/lembaga sebagai bukti Kegiatan 1 telah dilakukan. Seluruh output ini akan dimuat dalam Laporan Aktualisasi sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

### III. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 29 Agustus 2019  
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

*Amr*

Dr. Asen Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.  
NIP. 197109111997031005

# Laporan Singkat Hasil Konsultasi dengan Mentor



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT  
KONSULTASI DENGAN MENTOR**

Hari, tanggal : Selasa, 3 September 2019  
Pukul : 15.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Pembahasan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang sedang dan akan dilaksanakan

## I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada sesi konsultasi pertama ini, topik pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai progres pelaksanaan aktualisasi pada minggu pertama pelaksanaan, yaitu minggu ke-4 bulan Agustus 2019. Sejauh ini, progres yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 1, yaitu melakukan pengumpulan data, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan tahapan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 28 Agustus 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan;
2. melakukan konsultasi dengan mentor dan telah berlangsung pada 3 September 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan;
3. melakukan pengumpulan data RKA K/L yang diperoleh dari Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Himpunan RKA K/L Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, pada sesi konsultasi kali ini, dilakukan koordinasi mengenai rencana evidences yang akan dimuat dalam Laporan Aktualisasi yang membutuhkan persetujuan dan tanda tangan dari mentor, misalnya Lapsing dan dokumentasi.

## II. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 16.00 WIB

Jakarta, 3 September 2019

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM,  
198806212014022001

**Lampiran Tahapan Kegiatan 1.2****Sumber data RKA K/L tahun anggaran 2018-2020 yang digunakan**

Tahun Anggaran	Sumber	Keterangan
2018	Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	Lampiran III
2019	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019	Lampiran III
2020	UU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020	Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020

## **LAMPIRAN KEGIATAN 2**

- 2.1 Data anggaran yang telah disusun pada tingkat program kementerian/lembaga
- 2.2 Data yang sudah terkласifikasi berdasarkan pembagian mitra kerja di 11 Komisi DPR RI
- 2.3 Database anggaran kementerian/lembaga pada tingkat program dalam bentuk modifikasi grafik
- 2.4 Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor

**Lampiran Tahapan Kegiatan 2.1**  
**Data RKA K/L yang disusun pada tingkat program**

**011 - Kementerian Luar Negeri**

Kode Program	Fungsi	Program	2018	2019	2020
			Anggaran	Anggaran	Anggaran
011.01.01	Pelayanan Umum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.918.776.399	4.586.996.658	5.306.319.688
011.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	1.016.908.688	1.074.912.100	1.194.912.014
011.01.14		Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	577.441.000	831.106.023	811.945.121
011.02.08		Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	75.220.130	96.923.001	94.041.196
011.03.10		Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	52.673.535	52.082.524	63.175.622
011.04.06		Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	59.830.021	54.185.182	58.534.103
011.05.07		Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	787.806.556	891.692.608	827.113.498
011.06.13		Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	104.481.322	102.002.215	94.910.553
011.07.09		Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	43.232.550	38.002.298	42.562.988
011.08.12		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokol dan Kekonsuleran	136.701.366	119.445.511	121.660.873
011.09.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	33.109.334	32.374.190	35.396.133
011.11.11		Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	38.140.641	32.036.553	35.436.552
<b>Jumlah</b>			<b>7.844.321.542</b>	<b>7.911.758.863</b>	<b>8.686.008.341</b>

**005 - Mahkamah Agung**

Kode Program	Fungsi	Program	2018	2019	2020
			Anggaran	Anggaran	Anggaran
005.01.01	Ketertiban dan Keamanan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.132.236.001	7.159.572.934	8.723.644.945
005.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	584.448.358	481.321.500	1.226.107.296
005.02.06		Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	157.270.100	157.669.197	172.033.639
005.03.07		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	152.581.761	139.915.933	148.038.623
005.04.08		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.643.906	70.627.868	85.807.448
005.05.09		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23.708.288	23.717.231	28.551.651
005.06.05		Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	107.622.532	210.090.513	173.471.039
005.07.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	32.589.054	33.552.299	40.273.336
<b>Jumlah</b>			<b>8.262.100.000</b>	<b>8.276.467.475</b>	<b>10.597.927.977</b>

### 025 - Kementerian Agama

Kode Program	Fungsi	Program	2018	2019	2019
			Anggaran	Anggaran	Anggaran
025.01.01	Agama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.135.816.240	2.021.016.651	1.921.417.232
025.01.13		Program Kerukunan Umat Beragama	77.873.290	80.014.140	46.973.277
025.02.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	91.375.363	101.527.316	76.822.476
025.03.08		Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.130.689.599	5.157.052.074	5.617.461.944
025.05.09		Program Bimbingan Masyarakat Kristen	217.000.233	256.216.938	254.432.480
025.06.10		Program Bimbingan Masyarakat Katolik	189.736.919	218.887.808	173.014.331
025.07.11		Program Bimbingan Masyarakat Hindu	123.255.613	159.924.001	100.591.062
025.08.12		Program Bimbingan Masyarakat Buddha	64.106.294	77.986.461	54.253.575
025.09.06		Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.085.824.226	1.486.621.215	1.554.866.308
025.11.04		Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	339.080.741	382.293.870	250.647.411
025.12.14		Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	18.523.068	201.416.463	40.288.541
025.01.13	Pendidikan	Program Kerukunan Umat Beragama	7.000.000	7.000.000	6.367.760
025.02.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	62.096.110	62.000.000	85.573.796
025.04.07		Program Pendidikan Islam	49.089.647.287	48.514.443.637	51.454.932.558
025.05.09		Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.678.575.979	1.566.438.849	1.525.325.460
025.06.10		Program Bimbingan Masyarakat Katolik	721.797.274	711.002.404	711.912.404
025.07.11		Program Bimbingan Masyarakat Hindu	644.313.979	656.246.819	660.206.819
025.08.12		Program Bimbingan Masyarakat Buddha	216.315.841	185.019.308	215.529.954
025.11.04		Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	261.713.035	221.614.209	310.331.307
<b>Jumlah</b>			<b>62.154.741.091</b>	<b>62.066.722.163</b>	<b>65.060.948.695</b>

### 026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Kode Program	Fungsi	Program	2018	2019	2020
			Anggaran	Anggaran	Anggaran
026.01.01	Ekonomi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	402.575.082	294.254.093	310.502.875
026.02.03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	60.000.000	55.546.830	59.303.436
026.04.07		Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	766.681.820	750.290.524	754.134.817
026.05.08		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	184.947.680	170.078.518	160.612.726
026.08.09		Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	269.899.804	230.824.201	215.703.853
026.11.04		Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	84.478.298	79.085.218	112.085.217
026.13.06		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.772.596.620	1.255.056.393	497.353.092
026.01.01	Pendidikan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	-	20.000.000	15.000.000
026.13.06		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	450.000.000	2.930.000.000	4.785.162.954
<b>Jumlah</b>			<b>3.991.179.304</b>	<b>5.785.135.777</b>	<b>6.909.858.970</b>

## Lampiran Tahapan Kegiatan 2.2

### Komisi I DPR RI

#### 012 – Kementerian Pertahanan

Tahun	Program													Pertahanan - Mabes TNI					012.01.05		012.21.11		012.21.12		012.21.13		012.21.23					
	012.01.01		012.01.02		012.01.03		012.01.04		012.01.05		012.01.06		012.01.07		012.01.08		012.01.09		012.01.10		012.01.27		012.01.05		012.21.11		012.21.12		012.21.13		012.21.23	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	Penelitian dan Pengembangan Kemhan/TNI	Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	Strategi Pertahanan	Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	Potensi Pertahanan	Kekuatan Pertahanan	Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	Prajurit Integratif	Penyelenggaran Manajemen dan Operasional Integratif																
2018	1,215,558,954	17,268,042,739	61,941,747	3,282,303,579	79,065,345	110,351,648	73,069,437	3,528,286,753	197,380,144	116,203,915	36,902,641	173,400,000	2,696,284,298	716,259,811	399,339,738	3,720,947,064																
2019	2,376,164,687	15,366,071,531	56,661,790	243,929,203	87,956,381	114,684,396	70,041,220	1,384,634,192	256,296,537	102,196,253	35,781,750	173,400,000	2,960,537,176	715,352,131	409,223,776	3,876,530,410																
2020	1,346,290,911	15,070,468,965	68,566,771	237,326,641	114,851,555	104,139,866	81,600,881	2,494,353,609	235,402,854	117,027,146	62,967,202	184,506,784	2,868,724,104	921,110,539	408,455,325	4,689,626,375																
Pertahanan - AD													Pertahanan - AL					Pertahanan - AU														
012.22.14	012.22.15	012.22.16	012.22.24	012.23.17	012.23.18	012.23.19	012.23.25	012.24.20	012.24.21	012.24.22	012.24.26	Total																				
Dukungan Kesiapan Matra Darat	Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	Dukungan Kesiapan Matra Laut	Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasaraana Matra Laut	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	Dukungan Kesiapan Matra Udara	Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara																					
2,218,411,334	3,990,780,212	1,783,173,486	37,318,132,164	2,547,180,932	3,395,442,675	440,186,959	9,721,023,192	4,340,904,781	1,982,787,856	590,944,581	5,678,079,077	107,682,385,062																				
3,003,132,888	5,153,459,772	1,898,635,347	37,490,176,005	2,952,154,767	3,610,833,181	523,045,951	11,162,540,806	4,939,433,041	2,581,331,524	761,444,616	6,052,263,658	108,357,912,989																				
5,032,189,025	4,585,474,940	2,114,978,230	47,865,487,731	4,942,638,044	4,163,690,866	628,070,261	13,027,650,381	5,985,923,427	2,114,438,983	623,758,409	7,267,877,981	127,357,597,806																				

## 011 – Kementerian Luar Negeri

Tahun	Program											Total	
	Pelayanan Umum												
	011.01.01	011.01.02	011.01.14	011.02.08	011.03.10	011.04.06	011.05.07	011.06.13	011.07.09	011.08.12	011.09.03	011.11.11	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri		
2018	4,918,776,399	1,016,908,688	577,441,000	75,220,130	52,673,535	59,830,021	787,806,556	104,481,322	43,232,550	136,701,366	33,109,334	38,140,641	7,844,321,542
2019	4,586,996,658	1,074,912,100	831,106,023	96,923,001	52,082,524	54,185,182	891,692,608	102,002,215	38,002,298	119,445,511	32,374,190	32,036,553	7,911,758,863
2020	5,306,319,688	1,194,912,014	811,945,121	94,041,196	63,175,622	58,534,103	827,113,498	94,910,553	42,562,988	121,660,873	35,396,133	35,436,552	8,686,008,341

## 059 – Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tahun	Program											Total	
	Ekonomi												
	059.01.01	059.01.02	059.02.03	059.03.06	059.04.08	059.05.07	059.06.04	059.07.09	059.07.10	059.03.06	059.06.04		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Pengembangan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			
2018	264,266,864	493,500	22,605,960	855,320,081	144,971,236	3,219,800,394	168,744,086	194,843,360	-	-	51,614,792	4,922,660,273	
2019	267,284,368	388,507	25,074,586	517921667	246,765,509	3,421,443,796	152,244,314	265,318,143	-	372,687,883	111,226,315	5,380,355,088	
2020	259,938,890	-	18,638,531	747,965,677	377,097,730	349,436,267	195,849,986	176,875,033	3,170,757,157	205,319,236	108,626,989	5,610,505,496	

050 – Badan Intelijen Negara

Tahun	Program			Total	
	Ketertiban dan Keamanan				
	050.01.01	050.01.03	050.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara			
2018	3,634,814,229	17,200,000	1,994,200,771	5,646,215,000	
2019	1,726,537,884	17,200,000	3,609,690,997	5,353,428,881	
2020	813,317,137	17,200,000	2,272,000,486	3,102,517,623	

064 – Lembaga Ketahanan Nasional

Tahun	Program			Total	
	Pertahanan				
	064.01.01	064.01.03	064.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	Pengembangan Ketahanan Nasional			
2018	175,665,900	2,325,000	99,707,100	277,698,000	
2019	137,320,648	1,789,863	62,269,275	201,379,786	
2020	149,634,816	1,789,863	52,808,838	204,233,517	

051 – Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun	Program			Total	
	Ketertiban dan Keamanan				
	051.01.01	051.01.06			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	Pengembangan Siber dan Sandi Negara				
2018	264,905,000	704,350,000	969,255,000		
2019	289,035,813	2,019,064,282	2,308,100,095		
2020	899,899,712	1,306,408,860	2,206,308,572		

052 – Dewan Ketahanan Nasional

Tahun	Program		Total	
	Pertahanan			
	052.01.01	052.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional		
2018	32,152,600	10,237,400	42,390,000	
2019	32,628,997	10,201,443	42,830,440	
2020	37,038,711	9,730,484	46,769,195	

116 – Lembaga Penyiaran Publik Radio RI

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	116.01.01	116.01.06		
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPPRRI	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik		
2018	140,055,273	818,013,487	958,068,760	
2019	165,710,269	828,409,842	994,120,111	
2020	293,630,639	1,019,556,054	1,313,186,693	

117 – Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	117.01.01	117.01.06		
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik		
2018	235,160,235	603,736,101	838,896,336	
2019	242,294,133	708,727,559	951,021,692	
2020	293,630,639	1,019,556,054	1,313,186,693	

## KOMISI II DPR RI

### 010 – Kementerian Dalam Negeri

Tahun	Program												Total	
	Pelayanan Umum													
	010.01.01	010.02.03	010.03.11	010.04.08	010.05.13	010.06.06	010.07.07	010.08.10	010.09.09	010.11.04	010.12.05	Pendidikan		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bina Administrasi Kewilayah	Bina Pemerintahan Desa	Bina Pembangunan Daerah	Bina Otonomi Daerah	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pendidikan Kepamongprajaan	010.01.12		
2018	406.361.764	51.354.876	31.525.000	56.543.784	10.700.000	58.136.939	74.570.201	884.783.485	32.554.000			600.114.317	2.206.644.366	
2019	439.316.444	73.785.352	237.329.445	140.323.540	227.651.971	237.309.528	86.903.286	811.277.593	75.139.543	44.363.879	198.346.269	601.223.776	3.172.970.626	
2020	468.199.585	76.737.754	245.773.691	244.534.546	260.126.498	234.210.165	90.017.364	788.412.970	80.690.866	56.862.486	209.292.675	676.436.370	3.431.294.970	

### 056 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Tahun	Program												Total	
	Perlindungan Lingkungan Hidup													
	056.01.01	056.01.02	056.01.13	056.02.03	056.03.06	056.04.07	056.05.08	056.06.09	056.07.10	056.08.11	056.09.12			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR / BPN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	Pengelolaan Pertanahan Daerah	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Pengembangan Infrastruktur Keagariaan	Penataan Hubungan Hukum Keagariaan	Penataan Agraria	Pengadaan Tanah	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang				
2018	3.913.965.567	272.071.195	4.078.287.674	13.314.061	220.906.151	309.874.469	32.278.360	21.149.080	13.169.583	177.447.968	13.417.378	9.065.881.486		
2019	4.023.349.827	347.131.180	4.420.159.150	15.848.655	220.906.151	384.393.813	32.278.360	21.149.080	13.169.583	177.447.968	13.417.378	9.669.251.145		
2020	4.483.019.465	248.312.674	4.511.019.177	25.000.000	230.088.297	323.320.340	34.050.738	23.459.405	16.598.779	183.797.826	18.312.534	10.096.979.235		

007- Kementerian Sekretariat Negara RI

Tahun	Program									Total	
	Pelayanan Umum										
	007.01.01	007.01.06	007.03.01	007.04.01	007.04.06	007.05.01	007.05.06	007.06.01	007.07.01		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional		
2018	1.084.552.737	16.770.090	369.800.000	128.244.210	3.555.790	6.600.000	28.400.000	41.000.000	40.000.000	1.718.922.827	
2019	1.237.597.469	10.152.606	361.931.700	104.646.971	2.581.434	6.005.012	24.965.764	40.091.069	36.396.300	1.824.368.325	
2020	1.160.519.385	8.530.995	451.197.546	144.663.761	52.963.493	6.263.370	24.955.844	75.719.012	32.850.870	1.957.664.276	

048 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	048.01.01	048.01.06	048.01.07		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)		
2018	145.835.311	184.831.089	26.700.000	357.366.400	
2019	142.746.743	157.609.364	22.979.780	323.335.887	
2020	168.862.184	116.373.008	19.075.006	304.310.198	

### 076 – Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	076.01.01	076.01.02	076.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
2018	10.531.467.027	20.400.800	1.956.782.437	12.508.650.26	
2019	15.107.204.670		2.996.934.400	18.104.139.07	
2020	2.078.104.195		81.407.400	2.159.511.59	

### 088 – Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	088.01.01	088.01.02	088.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara			
2018	450.467.210	55.540.540	148.918.661	654.926.411	
2019	471.318.960	41.231.040	112.594.810	625.144.810	
2020	499.838.944	41.049.125	101.971.516	642.859.585	

### 115 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	115.01.01	115.01.06			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu				
2018	244.353.817	5.323.841.647	5.568.195.464		
2019	240.713.480	8.388.020.423	8.628.733.903		
2020	184.075.278	2.779.687.325	2.963.762.603		

### 086 – Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Tahun	Program				Total
	Pelayanan Umum			Pendidikan	
	086.01.01	086.01.02	086.01.06	086.01.06	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	
2018	188.263.930	8.350.000	71.933.886	23.343.696	291.891.512
2019	225.974.449	11.670.000	56.711.009	24.983.257	319.338.715
2020	243.101.950	20.206.672	52.314.091	23.109.423	338.732.136

110 – Ombudsman RI

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	110.01.01	110.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	Pengawasan Pelayanan Publik			
2018	107.634.856	40.490.150	148.125.006	
2019	109.068.755	41.650.000	150.718.755	
2020	130.552.252	35.756.900	166.309.152	

087 – Arsip Nasional Republik Indonesia

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	088.01.01	088.01.02	088.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara			
2018	450.467.210	55.540.540	148.918.661	654.926.411	
2019	471.318.960	41.231.040	112.594.810	625.144.810	
2020	499.838.944	41.049.125	101.971.516	642.859.585	

111 – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	111.01.01	111.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan			
2018	108.455.000	95.087.280	203.542.280	
2019	133.608.340	60.360.000	193.968.340	
2020	186.174.974	59.523.000	245.697.974	

## KOMISI III DPR RI

### 013 – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun	Program											Total	
	Ketertiban dan Keamanan										Pendidikan		
	013.01.01	013.02.03	013.03.07	013.05.08	013.06.10	013.07.09	013.08.06	013.09.11	013.10.12	013.11.04	013.12.05		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Administrasi Hukum Umum	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Pembentukan Hukum	Pemajuan HAM	Pembinaan Hukum Nasional	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	
2018	2.761.179.680	32.223.447	680.307.515	4.263.913.635	2.257.320.972	193.723.991	41.419.507	34.283.683	108.570.670	29.900.158	141.167.800	47.399.185	10.591.410.243
2019	3.632.819.705	34.287.514	733.985.545	5.881.088.841	2.422.072.257	274.606.452	41.974.869	35.207.054	103.026.602	29.704.002	72.337.706	44.761.319	13.305.871.866
2020	4.279.294.802	42.528.310	658.732.959	5.454.896.323	2.255.838.024	217.241.005	45.976.388	46.126.378	109.639.168	40.400.863	395.181.319	60.598.184	13.606.453.723

### 060 – Kepolisian Negara RI

Tahun	Anggaran Menurut Fungsi dan Kode Program												Total	
	Ketertiban dan Keamanan													
	060.01.01	060.01.02	060.01.03	060.01.04	060.01.05	060.01.06	060.01.07	060.01.08	060.01.09	060.01.10	060.01.11	060.01.12	060.01.13	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	Penelitian dan Pengembangan Polri	Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	Pemberdayaan Potensi Keamanan Masyarakat	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	Penelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Pengembangan Hukum Kepolisian Berkadar Tinggi	
2018	38.438.621.883	34.888.515.079	491.532.849	17.686.600	1.455.712.049	457.244.406	1.738.485.763	161.060.320	1.293.515.670	9.450.576.040	3.520.434.151	3.084.752.458	33.332.524	95.031.469.792
2019	37.900.882.093	23.783.422.962	521.410.600	27.383.118	1.468.532.938	544.234.278	1.780.971.992	152.819.755	1.280.492.923	12.054.170.612	3.798.037.233	2.828.342.931	47.099.806	85.187.801.241
2020	48.126.372.534	18.269.290.968	522.832.245	27.692.714	1.626.083.284	565.458.307	1.788.186.081	162.574.676	1.109.648.797	10.467.102.613	4.470.351.574	3.079.009.488	107.620.072	90.322.223.353

## 006 – Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun	Program								Total	
	Ketertiban dan Keamanan									
	006.01.01	006.01.02	006.01.03	006.01.05	006.01.06	006.01.07	006.01.08	006.01.09		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Penelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		
2018	3.758.207.918	1.414.816.814	25.679.551	98.259.268	124.390.555	642.395.809	300.388.029	22.467.731	6.386.605.675	
2019	3.701.339.140	1.764.872.381	31.882.486	114.232.744	100.860.586	385.717.451	229.764.612	17.602.582	6.346.271.982	
2020	4.667.313.067	1.373.622.732	22.771.629	202.923.748	115.373.167	255.461.848	147.245.264	12.794.340	6.797.505.795	

## 005 – Mahkamah Agung

Tahun	Program								Total	
	Ketertiban dan Keamanan									
	005.01.01	005.01.02	005.02.06	005.03.07	005.04.08	005.05.09	005.06.05	005.07.03		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI		
2018	7.132.236.001	584.448.358	157.270.100	152.581.761	71.643.906	23.708.288	107.622.532	32.589.054	8.262.100.000	
2019	7.159.572.934	481.321.500	157.669.197	139.915.933	70.627.868	23.717.231	210.090.513	33.552.299	8.276.467.475	
2020	8.723.644.945	1.226.107.296	172.033.639	148.038.623	85.807.448	28.551.651	173.471.039	40.273.336	10.597.927.977	

### 093 – Komisi Pemberantasan Korupsi

Tahun	Program		Total	
	Ketertiban dan Keamanan			
	093.01.01	093.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
2018	539.934.800	250.234.748	790.169.548	
2019	603.809.374	209.639.891	813.449.265	
2020	721.281.521	201.293.735	922.575.256	

### 001 – Majelis Permusyawaratan Rakyat

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	001.01.01	001.01.02	001.02.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya		
2018	157.180.219	-	795.622.795	952.803.014	
2019	165.540.373	-	792.856.882	958.397.255	
2020	148.263.800	-	455.406.469	603.670.269	

### 074 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tahun	Program		Total	
	Ketertiban dan Keamanan			
	074.01.01	074.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM		
2018	61.909.050	24.772.950	86.682.000	
2019	48.845.602	36.949.306	85.794.908	
2020	64.985.421	39.073.511	104.058.932	

### 095 – Dewan Perwakilan Daerah

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	095.01.01	095.01.02	095.02.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi		
2018	230.297.694	-	852.095.246	1.082.392.940	
2019	262.857.742	-	824.260.283	1.087.118.025	
2020	216.432.388	-	715.581.641	932.014.029	

### 077 – Mahkamah Konstitusi

Tahun	Program				Total	
	Ketertiban dan Keamanan					
	077.01.01	077.01.02	077.01.06	077.01.07		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		
2018	145.405.117	12.984.975	137.772.450	24.987.000	321.149.542	
2019	162.670.897	10.623.581	336.280.945	30.069.978	539.645.401	
2020	150.744.401	-	95.471.441	-	246.215.842	

### 078 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	078.01.01	078.01.02	078.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		
2018	80.704.000	-	50.300.000	131.004.000	
2019	85.990.159	-	94.372.064	180.362.223	
2020	111.108.678	-	89.432.736	200.541.414	

### 100 – Komisi Yudisial

Tahun	Program			Total	
	Ketertiban dan Keamanan				
	100.01.01	100.01.02	100.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim		
2018	79.991.739	-	34.868.863	114.860.602	
2019	92.048.837	-	31.961.640	124.010.477	
2020	87.290.712	-	15.184.828	102.475.540	

### 007 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	007.09.01			
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara			
2018	80.000.000		80.000.000	
2019	65.064.838		65.064.838	
2020	54.558.755		54.558.755	

## 066 – Badan Narkotika Nasional

Tahun	Program		Total	
	Ketertiban dan Keamanan			
	066.01.01	066.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		
2018	1.009.961.399	722.071.875	1.732.033.274	
2019	947.509.236	561.868.892	1.509.378.128	
2020	1.029.028.993	601.721.027	1.630.750.020	

## 113 – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Tahun	Program		Total	
	Ketertiban dan Keamanan			
	113.01.06			
	Penanggulangan Terorisme			
2018	505.586.324		505.586.324	
2019	699.598.337		699.598.337	
2020	516.942.029		516.942.029	

**KOMISI IV DPR RI**

**018 – Kementerian Pertanian**

Tahun	Program											Total	
	Ekonomi										Pendidikan		
	018.01.01	018.02.03	018.03.06	018.04.07	018.05.08	018.06.09	018.08.11	018.09.12	018.10.13	018.11.14	018.12.15	018.10.16	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelaanjutan	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelaanjutan	Peningkatan Penyaluhan dan Pelatihan Pertanian	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Pendidikan Pertanian		
2018	1.492.092.430	97.134.000	6.486.964.351	1.355.960.980	1.631.801.109	2.087.023.491	6.030.828.749	2.084.560.880	847.149.323	527.612.000	773.184.990	406.450.000	23.820.762.303
2019	1.434.152.891	94.408.464	6.010.019.254	1.040.378.419	1.114.218.315	2.073.121.296	4.927.538.742	1.865.476.595	907.598.560	678.688.925	852.815.222	688.100.000	21.686.516.683
2020	1.861.679.046	90.328.596	5.962.808.824	1.082.601.627	1.525.816.437	2.022.297.255	3.403.898.216	1.790.970.429	944.461.637	663.563.546	1.025.728.419	681.155.494	21.055.309.526

**032 – Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Tahun	Program											Total
	Ekonomi										Perlindungan Lingkungan Hidup	
	032.01.01	032.02.03	032.03.06	032.04.07	032.05.10	032.06.08	032.07.09	032.12.05	032.13.11	032.07.09	032.12.05	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Ruang Laut	Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengelolaan Ruang Laut	Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
2018	423.513.361	73.117.458	1.264.959.688	944.857.746	813.454.764	785.003.713	496.621.318	1.235.978.817	529.775.744	170.300.000	550.000.000	7.287.582.609
2019	523.438.939	73.381.988	619.122.765	656.379.044	646.521.072	362.218.547	381.713.829	1.160.983.764	529.720.397	54.535.933	474.997.491	5.483.013.769
2020	523.623.761	77.267.955	726.554.240	739.572.614	1.062.575.107	366.017.696	380.620.023	1.277.343.209	601.075.586	127.230.000	590.873.348	6.472.753.539

## 029 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun	Program																	Total	
	Ekonomi							Perindungan Lingkungan Hidup											
	029.01.01	029.02.03	029.03.06	029.06.09	029.07.04	029.08.10	029.04.07	029.04.07	029.05.08	029.06.09	029.08.10	029.09.11	029.10.12	029.11.13	029.12.14	029.13.15	029.08.10		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	Planologi dan Tata Lingkungan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan Penyaluhan dan Pengembangan SDM	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Planologi dan Tata Lingkungan	Peningkatan Penyaluhan dan Pengembangan SDM	Peningkatan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendalian Perubahan Iklim	Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Peningkatan Penyaluhan dan Pengembangan SDM			
2018	573.955.156	66.990.220	407.691.364	1.116.239.742	284.837.618	45.725.437	53.571.634	1.028.902.518	2.033.159.356	17.322.724	56.350.800	416.014.975	372.606.381	320.439.911	278.650.287	729.369.846	223.838.723	8.025.646.692	
2019	585.645.937	86.837.312	265.005.339	429.513.009	270.854.125	30.315.181	-	3.512.913.670	1.589.553.025	13.472.417	40.843.634	450.556.380	443.634.941	297.068.857	282.282.534	538.294.191	239.682.130	9.076.472.682	
2020	592.759.666	86.966.609	301.754.834	460.479.606	393.833.245	33.129.570	-	2.799.916.214	2.049.226.996	19.947.858	57.711.225	458.679.200	468.790.771	313.272.831	361.844.139	670.467.758	250.545.294	9.319.325.816	

## KOMISI V DPR RI

### 033 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun	Program																	Total		
	Ekonomi											Perumahan dan Fasilitas Umum				Pendidikan				
	033.01.01	033.01.02	033.02.03	033.04.08	033.05.07	033.06.10	033.06.15	033.11.04	033.13.06	033.14.13	033.15.14	033.16.16	033.05.07	033.07.11	033.08.12	033.16.16	033.05.07	033.13.06	033.15.14	
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Penyelenggaraan Jalan	Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumukiman	Penyelenggaraan Sumber Daya Air	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	Pembinaan Konstruksi	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Infrastruktur Perumahan	Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	Pengembangan Perumahan	Pengembangan Infrastruktur Perumahan	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	Pembinaan Konstruksi	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
2018	301.104.193	298.895.810	104.974.960	41.673.066.930	269.274.260	36.903.453.526	406.098.025	611.986.939	338.716.396	248.359.063	495.064.373	-	15.839.928.321	9.633.756.042	261.638.463	-	-	-	107.386.317.301	
2019	285.866.730	248.000.000	99.642.000	40.318.736.335	273.958.695	39.301.515.171	425.000.000	540.907.000	558.160.700	228.000.000	398.969.199	-	13.437.239.068	7.819.665.837	261.939.000	-	6.534.000.000	-	110.731.599.735	
2020	284.307.694	235.748.034	111.744.238	42.950.464.107	-	43.692.729.241	282.486.694	452.111.414	629.442.410	199.395.709	443.508.817	153.221.494	17.591.951.244	8.484.124.257	-	110.553.524	4.418.000.000	96.067.000	81.680.075	120.217.535.952

### 067 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tahun	Program								Total	
	Perumahan dan Fasilitas Umum							Pendidikan		
	067.02.03	067.03.06	067.04.07	067.05.08	067.06.09	067.07.10	067.08.11	067.10.01		
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pengembangan Daerah Tertentu	Pembangunan Daerah Tertinggal	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Perumukiman Transmigrasi	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dukungan Manajemen dan Pengembangan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi		
2018	57.060.378	2.822.670.394	332.081.502	262.792.792	320.060.761	391.254.350	400.000.000	278.775.543	280.557.341	5.145.253.061
2019	57.047.436	2.175.133.778	315.277.856	215.470.572	280.858.139	390.118.518	403.257.449	254.439.343	234.020.013	4.325.623.104
2020	51.396.100	2.042.663.767	121.518.278	115.732.573	138.110.182	347.728.971	238.036.385	212.198.626	230.420.013	3.497.804.895

## 022 – Kementerian Perhubungan

Tahun	Program									Total
	Ekonomi								Pendidikan	
	022.01.01	022.02.03	022.03.06	022.04.08	022.05.09	022.08.07	022.11.04	022.13.10	022.12.05	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	
2018	580.135.964	106.110.822	4.582.007.686	11.600.486.955	9.162.040.051	17.296.256.780	143.830.906	204.744.255	4.527.496.007	- 48.203.109.426
2019	701.230.745	107.671.530	4.013.041.163	10.311.153.289	7.194.866.668	15.167.603.688	138.253.242	108.160.645	3.758.406.165	54.529.919 41.554.917.054
2020	699.317.971	114.612.440	5.466.271.800	10.893.672.747	8.150.398.295	12.608.709.953	206.644.647	606.587.093	3.924.196.293	- 42.670.411.239

## 075 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Tahun	Program		Total	
	Ekonomi			
	075.01.01	075.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika		
2018	532.180.922	1.170.732.040	1.702.912.962	
2019	355.341.015	1.398.887.180	1.754.228.195	
2020	377.635.616	2.678.624.316	3.056.259.932	

**107 – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)**

Tahun	Program			Total	
	Ekonomi				
	107.01.01	107.01.02	107.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan		
2018	569.717.524	160.018.870	1.505.363.166	2.235.099.560	
2019	564.013.719	145.095.797	1.277.787.010	1.986.896.526	
2020	602.764.844	145.095.797	1.505.787.010	2.253.647.651	

**109 – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)**

Tahun	Program		Total	
	Ekonomi			
	109.01.01	109.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu		
2018	29.390.766	213.088.618	242.479.384	
2019	27.294.745	190.936.700	218.231.445	
2020	27.455.099	188.466.404	215.921.503	

## KOMISI VI DPR RI

### 019 – Kementerian Perindustrian

Tahun	Program																	Total	
	Ekonomi									Pendidikan									
	019.01.01	019.02.07	019.03.06	019.04.08	019.05.09	019.06.03	019.07.12	019.08.10	019.09.11	019.01.01	019.02.07	019.03.06	019.04.08	019.05.09	019.07.12	019.09.11	019.10.13		
Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Elektronika	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Menengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Mesin, Alat Farmasi, dan Tekstil	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri				
2018	322.666.614	124.964.753	126.141.000	124.904.050	369.897.840	43.616.390	709.671.398	195.297.671	54.638.270	756.056.221	-	-	-	-	-	-	2.505.187.593		
2019	241.689.149	78.032.821	69.726.482	57.934.840	89.965.641	45.449.543	589.384.644	-	75.379.658	-	33.600.000	53.352.800	68.796.260	289.844.920	66.105.091	44.000.000	1.786.062.710	3.589.324.559	
2020	268.113.373	112.653.354	124.150.095	127.731.100	366.079.829	46.144.030	694.930.381	-	148.183.224	1.064.022.168	-	-	-	-	-	-	2.952.007.554		

### 090 – Kementerian Perdagangan

Tahun	Program										Pendidikan	Total
	Ekonomi									090.01.01		
	090.01.01	090.01.02	090.02.09	090.03.07	090.04.08	090.05.03	090.06.06	090.07.10	090.08.04	090.09.11		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Perundingan Perdagangan Internasional	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	Pengembangan Ekspor Nasional	Perdagangan Berjangka Komoditi	Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan		
2018	662.030.123	58.500.000	1.982.444.315	150.000.000	148.887.001	44.500.000	155.463.929	70.426.317	37.256.324	225.000.000	-	3.534.508.009
2019	756.788.435	87.456.466	1.553.209.890	148.617.706	152.200.926	48.000.000	161.752.534	72.000.000	40.000.000	267.196.396	6.500.000	3.293.722.353
2020	871.398.184	339.595.926	1.105.756.514	188.485.440	183.168.582	54.795.599	345.021.612	84.075.529	52.167.520	346.172.995	6.500.000	3.577.137.901

#### 044 – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun	Program						Total
	Ekonomi					Pendidikan	
	044.01.01	044.01.02	044.01.06	044.01.07	044.01.08	044.01.06	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	
2018	209.084.738	81.265.500	413.228.147	42.916.289	83.043.710	115.000.000	944.538.384
2019	210.654.317	87.765.540	432.914.911	26.425.000	86.039.385	117.633.032	961.432.185
2020	216.954.769	95.480.780	429.376.868	26.925.000	85.999.785	117.600.000	972.337.202

#### 041 – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tahun	Program		Total	
	Ekonomi			
	041.01.01	041.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	Pembinaan BUMN		
2018	186.184.970	60.856.785	247.041.755	
2019	140.053.745	68.216.157	208.269.902	
2020	259.435.066	86.397.641	345.832.707	

**112 – Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

Tahun	Program		Total	
	Ekonomi			
	112.01.01	112.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP- Batam	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB- Batam		
2018	902.401.367	1.143.758.166	2.046.159.533	
2019	793.055.046	1.027.835.917	1.820.890.963	
2020	919.120.661	1.307.764.343	2.226.885.004	

**118 – Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang**

Tahun	Program		Total	
	Ekonomi			
	118.01.01	118.01.06		
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang		
2018	45.003.758	179.860.262	224.864.020	
2019	38.634.062	182.795.771	221.429.833	
2020	40.719.605	103.838.884	144.558.489	

**KOMISI VII DPR RI**

**020 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Tahun	Program												Total		
	Ekonomi														
	020.01.01	020.01.02	020.02.03	020.04.06	020.05.07	020.06.08	020.07.11	020.11.04	020.12.05	020.13.09	020.14.10	020.15.12	020.12.05		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Geologi	Penelitian, Mitigasi dan Pendidistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pengelolaan Energi Pengelolaan MIGAS Aceh	Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM		
2018	342.179.448	9.794.634	80.431.910	1.729.967.194	141.273.370	364.571.634	57.116.345	566.950.824	329.666.524	859.817.575	183.355.740	1.722.218.242	-	109.756.394	6.497.099.834
2019	342.456.898	-	64.768.004	1.171.369.684	97.538.427	295.524.722	35.632.701	425.059.669	271.911.967	735.681.081	168.810.242	1.195.648.659	-	185.014.361	4.989.416.415
2020	414.523.371	89.655.172	-	4.460.960.589	133.866.727	442.901.431	53.034.444	575.000.000	427.473.407	920.856.007	249.700.000	1.489.645.731	60.036.720	348.676.881	9.666.330.480

### 081 – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Tahun	Program			Total	
	Ekonomi				
	081.01.01	081.01.02	081.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt	Pengkajian dan Penerapan Teknologi		
2018	480.246.224	8.068.500	700.943.629	1.189.258.353	
2019	423.633.551	257.863.706	691.195.813	1.372.693.070	
2020	525.437.261	3.605.612	1.510.529.832	2.039.572.705	

### 085 – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	085.01.01	085.01.02	085.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir		
2018	107.947.415	-	69.920.910	177.868.325	
2019	103.292.818	-	75.414.154	178.706.972	
2020	94.664.857	-	31.979.676	126.644.533	

### 080 – Badan Tenaga Nuklir (BATAN)

Tahun	Program			Total
	Pelayanan Umum		Pendidikan	
	080.01.01	080.01.06	080.01.01	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	
2018	120.798.336	724.953.995	52.800.000	898.552.331
2019	146.870.696	708.234.590	33.800.000	888.905.286
2020	121.121.035	556.717.870	32.834.204	710.673.109

### 083 – Badan Informasi Geospasial (BIG)

Tahun	Program			Total	
	Perlindungan Lingkungan Hidup				
	083.01.01	083.01.06			
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan Informasi Geospasial			
2018	173.477.164	617.399.911	790.877.075		
2019	163.056.400	564.681.235	727.737.635		
2020	173.019.501	638.520.000	811.539.501		

082 – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	082.01.01	082.01.06		
	Dukungan	Pengembangan		
	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	Teknologi Penerbangan dan Antariksa		
2018	119.586.267	707.489.000	827.075.267	
2019	104.166.792	688.698.000	792.864.792	
2020	94.361.926	822.244.000	916.605.926	

079 – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Tahun	Program		Total	
	Ekonomi			
	079.01.01	079.01.06		
	Dukungan	Penelitian,		
	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	Penggunaan, dan Pemanfaatan Iptek		
2018	145.378.721	1.271.347.498	1.416.726.219	
2019	157.941.689	1.266.137.739	1.424.079.428	
2020	821.707.749	856.035.305	1.677.743.054	

## KOMISI VIII DPR RI

### 025 – Kementerian Agama

Tahun	Program																Total			
	Agama										Pendidikan									
	025.01.01	025.01.13	025.02.03	025.03.08	025.05.09	025.06.10	025.07.11	025.08.12	025.09.06	025.11.04	025.12.14	025.01.13	025.02.03	025.04.07	025.05.09	025.06.10	025.07.11	025.08.12	025.11.04	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Kerukunan Umat Beragama	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	Bimbingan Masyarakat Islam	Bimbingan Masyarakat Kristen	Bimbingan Masyarakat Katolik	Bimbingan Masyarakat Hindu	Bimbingan Masyarakat Buddha	Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	Penelitian Jaminan Produk Halal	Kerukunan Umat Beragama	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	Pendidikan Islam	Bimbingan Masyarakat Kristen	Bimbingan Masyarakat Katolik	Bimbingan Masyarakat Hindu	Bimbingan Masyarakat Buddha	Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama		
2018	2.135.816.240	77.873.290	91.375.363	5.130.689.599	217.000.233	189.736.919	123.255.613	64.106.294	1.085.824.226	339.080.741	18.523.068	7.000.000	62.096.110	49.089.647.287	1.678.575.979	721.797.274	644.313.979	216.315.841	261.713.035	62.154.741.091
2019	2.021.016.651	80.014.140	101.527.316	5.157.052.074	256.216.938	218.887.808	159.924.001	77.986.461	1.486.621.215	382.293.870	201.416.463	7.000.000	62.000.000	48.514.443.637	1.566.438.849	711.002.404	656.246.819	185.019.308	221.614.209	62.066.722.163
2020	1.921.417.232	46.973.277	76.822.476	5.617.461.944	254.432.480	173.014.331	100.591.062	54.253.575	1.554.866.308	250.647.411	40.288.541	6.367.760	85.573.796	51.454.932.558	1.525.325.460	711.912.404	660.206.819	215.529.954	310.331.307	65.060.948.695

### 027 – Kementerian Sosial

Tahun	Program								Total
	Perlindungan Sosial							Pendidikan	
	027.01.01	027.02.03	027.03.08	027.04.06	027.05.07	027.06.09	027.11.04	027.11.04	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	Pemberdayaan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan Fakir Miskin	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	
2018	332.315.654	44.088.417	433.823.251	1.006.519.857	17.671.377.420	21.455.112.967	274.396.379	78.108.141	41.295.742.086
2019	372.227.070	47.302.812	429.362.610	1.163.312.583	34.765.659.285	21.405.310.213	594.398.446	128.885.360	58.906.458.379
2020	469.129.710	46.550.770	391.757.849	973.764.729	31.363.074.415	28.992.250.028	473.075.388	58.040.705	62.767.643.594

#### 047 – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun	Program				Total	
	Perlindungan Sosial					
	047.01.01	047.01.06	047.01.07	047.01.08		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan Anak	Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2018	120.496.135	201.293.100	180.772.600	51.287.200	502.561.835	
2019	128.542.999	122.572.521	150.637.304	91.883.970	401.752.824	
2020	103.538.035	71.700.000	65.903.767	32.500.000	241.141.802	

#### 103 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tahun	Program			Total	
	Ketertiban dan Keamanan				
	103.01.01	103.01.03	103.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	Penanggulangan Bencana		
2018	258.276.396	13.000.000	478.103.903	749.380.299	
2019	206.975.671	12.000.000	400.450.000	619.425.671	
2020	213.608.214	8.924.900	478.113.700	700.646.814	

## KOMISI IX DPR RI

### 024 – Kementerian Kesehatan

Tahun	Program										Total	
	Kesehatan									Pendidikan		
	024.01.01	024.01.11	024.02.03	024.03.06	024.04.07	024.05.08	024.07.09	024.11.04	024.12.10	024.12.10		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Pengawatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	
2018	2.583.878.688	25.582.011.734	119.983.200	2.102.710.381	15.388.088.064	2.723.525.128	4.939.179.936	909.016.668	2.999.335.415	1.750.000.000	-	59.097.729.214
2019	1.986.077.681	26.778.709.773	108.750.943	1.673.642.056	15.952.041.884	2.641.905.147	4.479.337.816	805.387.027	2.570.688.417	1.750.000.000	-	58.746.540.744
2020	1.914.705.652	26.778.709.774	104.761.545	1.133.160.904	16.592.182.226	2.089.320.574	3.862.823.522	734.172.261	2.440.159.570	1.750.000.000	-	57.399.996.028

### 026 – Kementerian Ketenagakerjaan

Tahun	Program								Total	
	Ekonomi							Pendidikan		
	026.01.01	026.02.03	026.04.07	026.05.08	026.08.09	026.11.04	026.13.06	026.01.01		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	
2018	402.575.082	60.000.000	766.681.820	184.947.680	269.899.804	84.478.298	1.772.596.620	-	450.000.000	3.991.179.304
2019	294.254.093	55.546.830	750.290.524	170.078.518	230.824.201	79.085.218	1.255.056.393	20.000.000	2.930.000.000	5.785.135.777
2020	310.502.875	59.303.436	754.134.817	160.612.726	215.703.853	112.085.217	497.353.092	15.000.000	4.785.162.954	6.909.858.970

### 068 – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Tahun	Program				Total	
	Kesehatan					
	068.01.01	068.01.03	068.01.04	068.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga		
2018	2.963.061.741	17.600.000	264.256.496	2.299.866.100	5.544.784.337	
2019	2.466.512.841	13.245.071	129.157.928	1.182.695.889	3.791.611.729	
2020	2.504.855.038	11.378.121	51.095.996	1.014.224.905	3.581.554.060	

### 063 – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Tahun	Program				Total	
	Kesehatan					
	063.01.01	063.01.02	063.01.03	063.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan		
2018	378.332.217	115.121.000	-	1.680.275.176	2.173.728.393	
2019	381.360.451	68.468.001	22.124.859	1.498.242.235	1.970.195.546	
2020	491.081.440		21.495.137	1.404.149.592	1.916.726.169	

104 – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Tahun	Program	Total
	Ekonomi	
	104.01.06	
	Peningkatan Fasilitasi	
	Penempatan dan Perlindungan TKI	
2018	396.160.715	396.160.715
2019	317.971.678	317.971.678
2020	322.004.033	322.004.033

**KOMISI X DPR RI**

**023 – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Tahun	Program								Total	
	Pendidikan									
	023.01.01	023.02.03	023.03.06	023.05.09	023.11.04	023.13.10	023.15.12	023.16.13		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Dasar dan Menengah	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pelestarian Budaya	Guru dan Tenaga Kependidikan		
2018	1.768.057.003	192.188.790	22.574.237.959	1.805.463.073	1.154.945.174	396.946.190	1.829.626.560	10.370.535.251	40.092.000.000	
2019	1.800.491.734	188.524.713	18.241.917.758	1.813.256.980	1.188.578.297	581.986.879	1.795.283.807	10.383.047.766	35.993.087.934	
2020	1.712.765.448	150.819.770	19.474.649.720	1.650.463.169	1.014.720.467	551.557.489	1.358.482.330	9.787.859.092	35.701.317.485	

**040 – Kementerian Pariwisata**

Tahun	Program				Total
	Pariwisata			Pendidikan	
	040.01.01	040.01.02	040.01.06	040.01.06	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kepariwisataan	Pengembangan Kepariwisataan	
2018	340.000.000	-	2.665.408.080	728.000.000	3.733.408.080
2019	319.650.562	-	3.511.412.243	-	3.831.062.805
2020	346.242.464	-	2.908.507.813	1.122.450.214	4.377.200.491

## 092 – Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun	Program				Total
	Pelayanan Umum		Pariwisata	Pendidikan	
	092.01.01	092.01.02	092.01.08	092.01.06	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kepemudaan dan Keolahragaan	
2018	269.573.060	30.526.700	3.673.940.301	1.063.500.000	5.037.540.061
2019	295.178.356	7.163.056	836.404.108	812.346.450	1.951.091.970
2020	285.859.045	7.280.938	812.258.105	633.078.067	1.738.476.155

## 057 – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tahun	Program			Total
	Pelayanan Umum		Pendidikan	
	057.01.01	057.01.02	057.01.06	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	Pengembangan Perpustakaan	
2018	172.038.149	3.852.770	409.042.719	584.933.638
2019	191.664.196	3.446.521	535.664.846	730.775.563
2020	207.086.954	3.466.349	448.443.820	658.997.123

## 121 – Badan Ekonomi Kreatif

Tahun	Program		Total	
	Pariwisata			
	121.01.01	121.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif		
2018	149.271.380	596.886.760	746.158.140	
2019	152.868.677	504.282.537	657.151.214	
2020	177.264.607	712.396.565	889.661.172	

**KOMISI XI DPR RI**

**015 – Kementerian Keuangan**

Tahun	Program													Total		
	Pelayanan Umum											Pendidikan				
	015.01.01	015.02.03	015.03.07	015.04.12	015.05.13	015.06.08	015.07.14	015.08.09	015.09.10	015.11.04	015.12.11	015.01.01	015.11.04	015.08.09	015.13.15	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	Pengelolaan Anggaran Negara	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Pengelolaan Pembentukan dan Risiko	Pengelolaan Perbendaharaan	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	Pengelolaan Perbendaharaan	Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	45.682.169.483	
2018	18.080.004.241	118.341.754	154.537.430	7.441.352.425	3.393.722.235	144.022.253	119.511.382	12.660.896.220	872.909.999	731.706.890	157.414.654	1.807.750.000	-	-	45.682.169.483	
2019	18.204.748.252	102.879.589	115.737.072	6.848.078.153	2.965.895.119	105.654.656	111.665.174	12.499.627.039	687.289.562	488.335.015	128.330.558	2.565.980.000	147.058.823	60.000.000	125.103.028	45.156.382.040
2020	19.368.117.358	108.380.967	153.933.832	7.943.239.015	3.638.282.535	106.420.183	110.018.054	8.047.677.433	769.773.190	466.374.590	132.112.926	2.238.780.000	263.554.675	43.001.573	121.556.880	43.511.223.211

**055 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

Tahun	Program				Total	
	Pelayanan Umum					
	055.01.01	055.01.02	055.01.03	055.01.06		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional			
2018	321.008.917	520.000.000	5000000	1.148.095.386	1.994.104.303	
2019	870.240.000	-	10.250.000	900.619.088	1.781.109.088	
2020	870.250.000	-	10.000.000	948.439.846	1.828.689.846	

054 - Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun	Program					Total
	Pelayanan Umum				Pendidikan	
	054.01.01	054.01.02	054.01.03	054.01.06	054.01.01	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	
2018	2.544.466.502	250.756.780	13.797.909	1.881.006.430	70.212.342	4.760.239.963
2019	2.576.260.204	249.146.142	8.619.710	2.306.527.480	71.234.429	5.211.787.965
2020	2.973.718.663	-	-	4.955.074.904	-	7.928.793.567

004 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tahun	Program						Total	
	Pelayanan Umum							
	004.01.01	004.01.02	004.01.03	004.01.06	004.01.07	004.01.08		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan keuangan Negara	Pemeriksaan Keuangan Negara		
2018	795.584.868	-	-	-	-	2.041.946.251	2.837.531.119	
2019	765.607.341	-	-	-	-	2.187.465.397	2.953.072.738	
2020	657.328.709	-	-	-	-	2.880.408.195	3.537.736.904	

089 – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
(BPKP)

Tahun	Program		Total	
	Pelayanan Umum			
	089.01.01	089.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
2018	1133442236	318541373	1.451.983.609	
2019	1.141.390.771	290.363.143	1.431.753.914	
2020	1.446.061.096	414.907.738	1.860.968.834	

106 – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

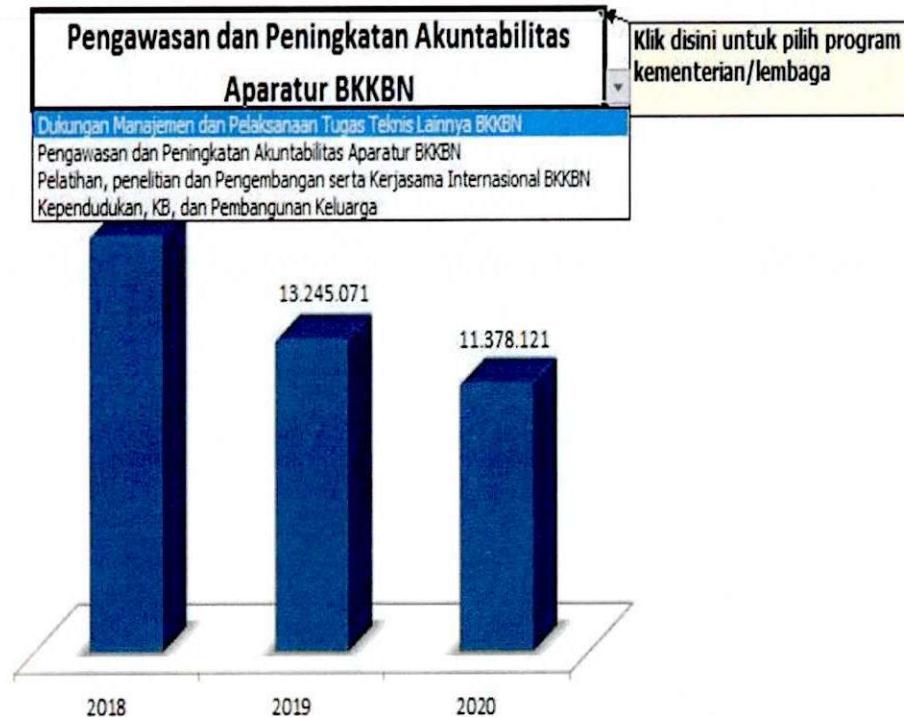
Tahun	Program			Total	
	Pelayanan Umum				
	106.01.01	106.01.02	106.01.06		
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
2018	78.632.614	7.957.140	138.219.518	224.809.272	
2019	77.863.448	-	135.238.659	213.102.107	
2020	80.764.804	-	88.910.630	169.675.434	

Lampiran Tahapan Kegiatan 2.3

Data pada tingkat program yang telah didesain dalam bentuk modifikasi grafik (contoh)

ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Program
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
2018	17.600.000
2019	13.245.071
2020	11.378.121

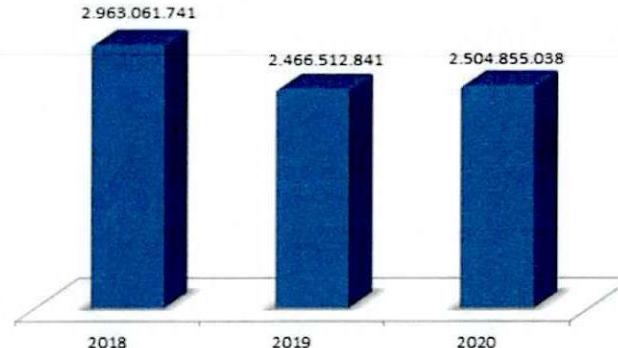


ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	
2018	2.963.061.741
2019	2.466.512.841
2020	2.504.855.038

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

Klik disini untuk pilih program kementerian/lembaga

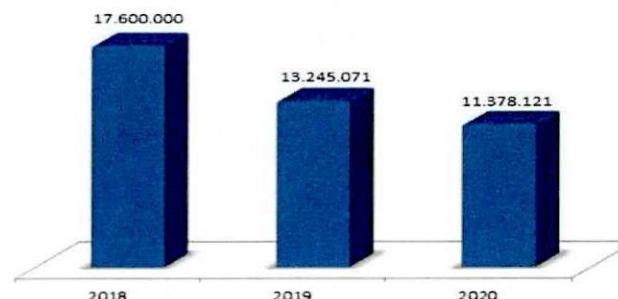


ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	
2018	17.600.000
2019	13.245.071
2020	11.378.121

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Klik disini untuk pilih program kementerian/lembaga

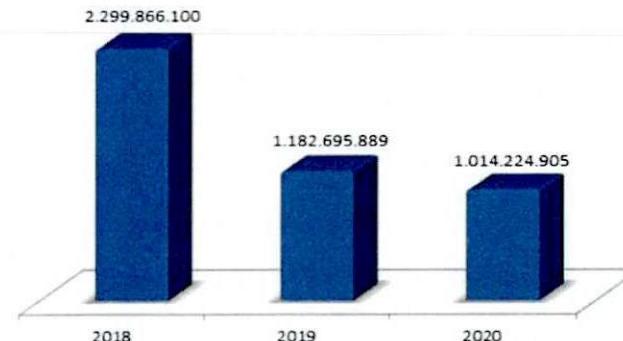


**ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)**

Tahun	Program
	Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
2018	2.299.866.100
2019	1.182.695.889
2020	1.014.224.905

**Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga**

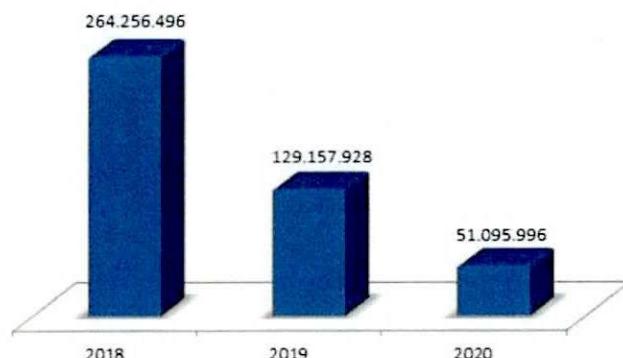
Klik disini untuk pilih program kementerian/lembaga

**ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)**

Tahun	Program
	Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
2018	264.256.496
2019	129.157.928
2020	51.095.996

**Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN**

Klik disini untuk pilih program kementerian/lembaga



## Lampiran Tahapan Kegiatan 2.4 Laporan Singkat Hasil Konsultasi dengan Mentor



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, tanggal : Kamis, 3 Oktober 2019  
Pukul : 9.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Pembahasan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang sedang dan akan dilaksanakan

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada sesi konsultasi kedua ini, topik pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai progres pelaksanaan aktualisasi pada minggu kedua pelaksanaan, yaitu minggu ke-3 bulan September 2019. Sejauh ini, progres yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 2, yaitu melakukan pengolahan data yang disusun pada tingkat program kementerian/lembaga, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengolah data RKA K/L yang disusun pada tingkat program K/L;
2. Mengklasifikasikan data sesuai dengan mitra kerja 11 komisi DPR RI dengan output database yang telah terkласifikasi sesuai dengan mitra kerja;
3. Mendesain database RKA K/L pada tingkat program dalam bentuk modifikasi grafik dengan output contoh data dalam bentuk grafik yang akan dilampirkan dalam laporan kegiatan;
4. Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait kelayakan dan desain database sebelum dipresentasikan dalam rapat internal maupun diunggah ke dalam website

Diselenggarakan sesi konsultasi pada kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kritik, saran, serta persetujuan dari Mentor terkait database yang telah dikerjakan. Selain itu, pada sesi konsultasi kali ini, dilakukan koordinasi mengenai rencana *evidences* yang akan dimuat dalam Laporan Aktualisasi yang membutuhkan persetujuan dan tanda tangan dari mentor, misalnya Lapsing dan dokumentasi.

#### II. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 10.30 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2019

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM,  
198806212014022001

### **LAMPIRAN KEGIATAN 3**

- 3.1 Catatan hasil penyerahan atas Laporan Hasil Kegiatan
- 3.2 Undangan, notulensi, daftar hadir, dokumentasi presentasi

## Lampiran Tahapan Kegiatan 3.1

### Catatan hasil penyerahan laporan aktualisasi kepada atasan dan mentor



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajanggaran.dpr.go.id

#### CATATAN HASIL PENYERAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPADA ATASAN DAN MENTOR

Hari, Tanggal	:	Senin, 7 Oktober 2019
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Acara	:	CPNS Menyerahkan Laporan Aktualisasi Kepada Atasan dan Mentor
Narasumber	:	1. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. 2. Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

#### I. PEMBUKAAN

CPNS yang telah menyelesaikan laporan aktualisasi menyerahkan laporan aktualisasinya kepada atasan dan mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan. Proses penyerahan Laporan ini dilakukan pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran. Atasan dan mentor menerima laporan aktualisasi yang telah dibuat oleh CPNS.

#### II. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari pokok-pokok hasil konsultasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan, antara lain:

- a) Atasan dan mentor menerima laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh CPNS;
- b) Atasan dan mentor memberikan masukan dan pertanyaan seputar laporan aktualisasi yang dibuat oleh CPNS;

#### 3. PENUTUP

Demikianlah catatan atas hasil penyerahan laporan aktualisasi atas nama Deasy Dwi Ramiyu dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan Koordinator Bidang Pendapatan dan Pembiayaan yang juga sekaligus mentor.

Jakarta, 7 Oktober 2019

Mengetahui,  
Mentor

Mengetahui,  
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP. 198806212014022001

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.  
NIP. 197109111997031005

## Lampiran Tahapan Kegiatan 3.2

### Undangan presentasi



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor	:	PA/110/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2019	4 Oktober 2019
Derajat	:	Segera	
Lampiran	:		
Perihal	:	Undangan Rapat Koordinasi	
Yth.			
1.	Kasub TU Pusat Kajian Anggaran;		
2.	Para Korbid Analis APBN dan Analis APBN.		
<u>Jakarta</u>			

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa dalam rangka peningkatan pemberian dukungan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaksud mengadakan Presentasi Aktualitas CPNS Pusat Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Lt 6 Ruang 611  
Gedung Setjen dan BK DPR RI

No	Nama	Judul Aktualisasi
1	Deasy Dwi Ramiayu	Penyediaan Data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pada Website Puskajianggaran.dpr.go.id
2	Rosalina Tineke Kusumawardhani	Videografi Terkait tugas dan fungsi anggaran DPR RI
3	Satrio Arga Effendi	Penyediaan Database Informasi Hukum APBN Pada Website <a href="http://puskajianggaran.dpr.go.id">http://puskajianggaran.dpr.go.id</a>
4	Savitri Wulandari	Pemutakhiran Data Knowledge Management pada Website Pusat Kajian Anggaran
5	Tio Riyono	Penyediaan Data Triple Defisit dalam Menu Indikator Ekonomi pada Website Pusat Kajian Anggaran

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk menjadi Peserta dalam kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapan terima kasih.

Lakhar Kepala Pusat Kajian Anggaran,

**Husnul Latifah, S.Sos**  
NIP. 19720718 199703 2 001

## Daftar hadir kegiatan presentasi



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

### DAFTAR HADIR RAPAT TENTANG "PRESENTASI AKTUALISASI CPNS: DEASY RAMIAYU, SE., ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, SE., SATRIO ARGA EFFENDI, SE., SAVITRI WULANDARI, SE., TIO RIYONO, SE"

Hari/tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI  
Gedung Setjen dan BK Lantai 6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Asep Ahmad Saeuloh, SE., MSi	Kapus Kajian Anggaran	
2.	Husnul Latifah, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
3.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	Analis APBN Ahli Madya	
4.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	Analis APBN Ahli Pertama	
5.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	Analis APBN Ahli Pertama	
6.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., Mpm	Analis APBN Ahli Pertama	
7.	Marihot Nasution, Se, M.Si	Analis APBN Ahli Pertama	
8.	Adhi Prasetyo Satrio W., S.M.	Analis APBN Ahli Pertama	
9.	Martha Carolina,Se.,Ak.,M.Ak	Analis APBN Ahli Pertama	
10.	Ratna Christianingrum, S.Si, M.Si	Analis APBN Ahli Pertama	
11.	Dahiri, S.Si., M.Sc	Analis APBN Ahli Pertama	
12.	Ade Nurul Aida, S.E.	Analis APBN Ahli Pertama	

13.	Rendy Alvaro, S.Sos	Analis APBN Ahli Pertama	
14.	Deasy Dwi Ramiayu, S.E.	Analis APBN	
15.	Ervita Luluk Zahara, S.E.	Analis APBN	
16.	Muliara Shinta Andini, S.E.	Analis APBN	
17.	Nadya Ahda, S.E.	Analis APBN	
18.	Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.	Analis APBN	
19.	Riza Aditya Syafri, S.Ak.	Analis APBN	
20.	Satrio Arga Effendi, S.E.	Analis APBN	
21.	Savitri Wulandari, S.E.	Analis APBN	
22.	Tio Riyono, S.E.	Analis APBN	
23.	Damia Liana, S.E.	Analis APBN	
24.	Memed Sobari	Staf Pusat Kajian Anggaran	
25.	Musbiyatun	Staf Pusat Kajian Anggaran	
26.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	Staf Pusat Kajian Anggaran	
27.	HIKMATUL FITRI	Analis APBN non-Fungsional	
28.	Tawaria Widadarawati	–	
29.	Emilia Octavia	–	
30.	Khairina	–	
31.	Laras Lintang A.	Analis APBN Non Fungsional	
32.	Maiizi (Jinarni)	–	
33.	Fity Nur Mustiani	Analis Ahli	
34.	M. Rizal F	–	
35.			

## Notulensi kegiatan presentasi



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### NOTULENSI PELAKSANAAN SESI PRESENTASI INTERNAL PROYEK AKTUALISASI

Hari, tanggal : Senin, 07 Oktober 2019  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat 611 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Presentasi Internal Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Mengenai Proyek Aktualisasi Atas Nama Deasy Dwi Ramiyati

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Sebagai salah satu tahapan kegiatan aktualisasi, presentasi internal dilaksanakan dengan tujuan memperoleh *feedbacks* berupa kritik, saran, dan masukan dari seluruh Analis APBN Pusat Kajian Anggaran mengenai hasil proyek kegiatan yaitu Penyediaan Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga di website Pusat Kajian Anggaran. Sesi presentasi dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan di Ruang Rapat 611 Pusat Kajian Anggaran, dihadiri oleh beberapa Koordinator Bidang dan sejumlah *staff* Analis APBN. Adapun tanggapan dan pertanyaan yang diajukan pada sesi presentasi internal kali ini, antara lain:

1. **Bapak Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.**, selaku Koordinator Bidang Belanja Pemerintah Pusat: Apakah data yang disusun dan dikompilasi tersebut hanya menurut fungsi dan kode program? Apakah untuk mengetahui fungsi program harus berpindah ke menu 'Source'? Bagaimana jika data dengan tampilan grafik dijadikan dalam satu menu saja?

**Jawab:** Data yang disusun penulis hanya berdasarkan fungsi dan kode program saja, belum membahas indikator lainnya seperti jenis belanja. Untuk mengetahui fungsi program harus mengakses menu 'Source'. Untuk data tampilan grafik, penulis baru memiliki kompetensi untuk memisahkan bagian grafik dengan data yang ditampilkan. Kedepannya, mungkin penerapan

tampilan data seperti ini bisa diterapkan juga pada jenis-jenis data lainnya sesuai kebutuhan.

2. **Ibu Marihot Nasution, S.E., M.Si.**, selaku Analis APBN: bagaimana keberlanjutan dari penerapan data ini kedepannya? Apakah dengan menambahkan tahun anggaran dan program anggaran harus dilakukan input rumus ulang?

**Jawab:** Jika data yang harus diupdate seperti ini, penulis dapat bertanggung jawab melakukan update tahun anggaran selanjutnya. Untuk penambahan tahun anggaran dan program, maka perlu menginput rumus ulang, tidak dengan modifikasi grafik karena akan berubah dengan otomatis.

3. **Ibu Ade Nurul Aida, S.E.**, selaku Analis APBN: untuk mempermudah pembaca dalam memahami cara penggunaan data ini, bagaimana jika ditambahkan catatan penggunaan? Bagaimana jika cover data di setiap komisi didesain dengan warna yang lebih menarik?

**Jawab:** Catatan bawah kaki akan ditambahkan untuk menginformasikan menu 'Source' untuk mengetahui fungsi dan kode program kementerian/lembaga. Untuk cover data, penulis akan memperbaikinya agar data lebih menarik.

Secara umum, tanggapan positif didapatkan dari Kepala Pusat Kajian Anggaran dan rekan-rekan Analis APBN mengenai proyek aktualisasi terkait data RKA K/L ini.

#### II. PENUTUP

Demikianlah sesi presentasi internal dilaksanakan. Presentasi ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Mengetahui,  
Jakarta, 07 Oktober 2019

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
198806212014022001

#### **LAMPIRAN KEGIATAN 4**

- 4.1 Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor
- 4.2 Data RKA K/L yang dapat diakses melalui website Pusat Kajian Anggaran

## Lampiran Tahapan Kegiatan 4.1

### Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Pukul : 15.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Pembahasan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada sesi konsultasi ketiga ini, topik pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai progres pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada minggu kelima pelaksanaan, yaitu minggu ke-1 bulan Oktober 2019. Sejauh ini, progres yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 3, yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun laporan kegiatan, yang membahas isi laporan kegiatan untuk menerima masukan atau perbaikan atas laporan kegiatan;
2. Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan output yang akan dilampirkan dalam laporan kegiatan

Selain pembahasan atas pelaksanaan Kegiatan 3, sesi konsultasi ini juga membahas Kegiatan 4 yang akan dilaksanakan, yaitu pengunggahan konten data RKA K/L yang telah didesain dan diklasifikasikan pada website, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait data-data yang akan diunggah ke dalam website;
2. Melakukan pengunggahan data-data RKA K/L di website Pusat Kajian Anggaran

Diselenggarakan sesi konsultasi pada kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kritik, saran, serta persetujuan dari Mentor terkait database yang telah dikerjakan sebelum diunggah kedalam website puskajianggaran.dpr.go.id. Selain itu, pada sesi konsultasi kali ini, dilakukan koordinasi mengenai rencana evidences yang akan dimuat dalam Laporan Aktualisasi yang membutuhkan persetujuan dan tanda tangan dari mentor, misalnya Lapsing dan dokumentasi.

#### II. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 15.30 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2019

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
198806212014022001

## Lampiran Tahapan Kegiatan 4.2

### Data RKA K/L yang dapat diakses di website Pusat Kajian Anggaran

The screenshot shows a list of RKA K/L (Raport Kegiatan Anggaran) documents available on the website. The documents are organized into two main sections, each containing five entries. Each entry includes a thumbnail image of the document, the title, and a 'Download' button.

Section	Document Title	Download
Data Indikator	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi I DPR RI 2018-2020 / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>
	Kritik dan Saran	<a href="#">Download</a>
	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi II DPR RI 2018-2020 / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>
	Kritik dan Saran	<a href="#">Download</a>
	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi III DPR RI 2018-2020 / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>
Data K/L	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>
	Kritik dan Saran	<a href="#">Download</a>
	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2018-2020 / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>
	Kritik dan Saran	<a href="#">Download</a>
	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VII DPR RI 2018-2020 / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>
Data K/L	Kritik dan Saran	<a href="#">Download</a>
	Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2018-2020 / Oktober 2019	<a href="#">Download</a>